KORPORASI & POLITIK PERAMPASAN TANAH

Laksmi A. Savitri

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

YOGYAKARTA ● INDONESIA

KORPORASI & POLITIK PERAMPASAN TANAH

KORPORASI & POLITIK PERAMPASAN TANAH

LAKSMI A. SAVITRI

insist PRESS

KORPORASI
&
POLITIK
PERAMPASAN
TANAH

Penulis Laksmi A. Savitri ■ **Penyunting** Lubabun Ni'am ■ **Pencancang sampul** @masanik ■ **Perwajahan isi** Dwi Fajar ■ **Ilustrator** Ade Irawan, Ismail

Cetakan pertama, Oktober 2013
Hak cipta pada penulis.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Korporasi & Politik Perampasan Tanah/Savitri, Laksmi A./Yogyakarta: INSISTPress, Oktober 2013/xiv+110 halaman/14 x 21 cm

ISBN 978-602-8384-68-1

1. Etnografi Pembangunan
2. Politik Agraria
3. MIFEE
I. JUDUL

INSISTPress
Jalan Raya Kaliurang Km. 18 Sempu, Pakembinangun, Sleman, Yogyakarta 55582
Telepon/Faksimile: 0274-883452 ■ Surat elektronik: press@insist.or.id
Tapakmaya: http://www.insist.or.id/ ■ http://blog.insist.or.id/insistpress/
Facebook: Penerbit INSISTPress ■ Twitter: @insistpress

Prakata

BUAH pikir yang tertuang dalam buku ini diproduksi dari kerja kolaborasi penelitian, pendidikan kritis, dan pembuatan film untuk pendidikan dan kampanye yang dilakukan oleh empat institusi: Sekretariat untuk Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM), Sajogyo Institute, Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), dan Komunitas Perfilman Intertekstual (Kopi). Ide kerja kolaborasi ini dipicu oleh rencana riset University of Amsterdam, Belanda, tentang investasi dan konsesi pertanian skala besar sebagai bagian dari proses global perubahan penguasaan tanah, dengan mengkaji kasus *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE). Sejalan dengan sudah berlangsungnya gerakan advokasi anti-MIFEE yang diprakarsai oleh beberapa organisasi nonpemerintah di Jayapura, Jakarta, dan Bogor, juga berbagai kegiatan pendidikan kritis dalam kerangka

penegakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan SKP-KAM, maka dibangun ide dan dibentuklah proses yang mengintegrasikan kerja penelitian, pendidikan kritis, kampanye, dan advokasi yang mengupayakan terbangunnya konstituensi pada gerakan kedaulatan atas tanah di Merauke.

Sebagai sebuah paket informasi, tulisan ini merupakan karya etnografis yang menyajikan temuan-temuan penting di delapan kampung di aliran Kali Kumbe, Bian, dan Koloi. Informasi yang disajikan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menelaah secara lugas persoalan-persoalan yang menjadi pemantik perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan orang Marind secara khusus dan perubahan besar sosial ekologis yang sedang dirancang dan sudah terjadi di tanah Merauke dengan diberikannya beberapa konsesi kehutanan dan pertanian dalam payung program MIFEE.

Sebagai penulis, saya hanya melakukan satu bagian kecil dari keseluruhan, yakni menuangkan dan menyajikan hasil olah pikir dan kerja keras dari tim dan sahabat seperjalanan, yakni Zuhdi S. Sang, Muntaza, Yoseph Renyut, Okto Waken, Yuslam Fikri Anshari, Hengky, dan Kizito Heru. Tetapi, tanpa kerja dan belajar bersama warga di kampung-kampung, tidak mungkin pengetahuan ini bisa diproduksi dalam bentuk tulisan. Tidak kalah penting adalah permintaan dari kawan-kawan INSIST yang memungkinkan naskah yang teronggok setahun ini sekarang bisa berada di tangan pembaca. Tentu saja, seluruh proses kerja kami tidak terlepas dari kontribusi Pak Roem, Mas Oji, dan Kak Harry Woersok yang sudah membantu merajut semua ide menjadi kerja

nyata. Sebagai hasil interpretasi dan analisis, seluruh isi buku ini menjadi tanggung jawab penulis semata-mata.

Belajar tidak pernah punya kata selesai. Semoga buku ini berguna untuk memberikan semangat dalam memahami apa yang terjadi dalam perubahan kehidupan kita sehari-hari, pun di tempat yang jauh dari bayangan kita.

Merauke, 15 Juli 2012 dan Sleman, 20 September 2013

Daftar Isi

Prakata	v
Pengantar	xi
Bagian Pertama	
1. MIFEE: Mimpi Memberi Makan Dunia	3
Bagian Kedua	
2. Anim-Ha: Manusia Sejati	11
3. Mimpi Pembangunan dan Kemajuan	23
Bagian Ketiga	
4. Gelombang Besar Perubahan	35
5. Tawaran akan Masa Depan: Marind Anim Tanpa Tanah?	59
Bagian Keempat	
6. Mempertahankan Tanah, Merebut Masa Depan Marind Anim	83
Catatan Akhir	95
Sumber Bacaan	99
Singkatan	105
Tentang Penulis	109

PENGANTAR

MIFEE dan Momen Penemuan Kembali Identitas Marind Anim

Pastor Yohanes Mitakda, MSC

Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Missionarii Sacritissimi Cordis (MSC) di Indonesia.

DALAM laporan tahunan pada 1930, Sir Hubbert Murray, Gubernur Jenderal Inggris untuk Teritori Papua yang berkedudukan di Port Moresby, Papua Nugini, menulis, "*According to our British ideas this social revolution should have been the end of the Marind-anim: we should expect them to lose all interest in life and simply disappear.*" Nada pesimisme ini masih didengungkan lagi oleh pemimpin gereja Katolik pertama di wilayah Merauke, yaitu Uskup Agung Mgr. Hermanus Tillemans, MSC. Pada 1975 menjelang kematiannya, Uskup Agung Merauke pertama

berkebangsaan Belanda ini berujar, "Orang Marind akan menjadi orang asing di tanah Marind dan perlahan-lahan akan punah." Suara keprihatinan akan kepunahan Marind Anim di tanah sendiri telah diperdengarkan oleh orang-orang luar yang menyaksikan proses akulturasi yang tak seimbang di wilayah selatan Papua.

Pada 2010, ketika Pemerintah Indonesia mencanangkan program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Merauke, Leo, seorang kepala desa di Bibikem, suatu kampung kecil di wilayah distrik Tubang, menilai program MIFEE sebagai *tiq anim* (bahasa Marind yang berarti "wabah besar") yang akan memusnahkan sukunya. Wabah ini mengingatkan kita akan wabah dahsyat flu Spanyol yang merenggut dua puluhan ribu nyawa orang Marind di awal abad XX. Pastor Petrus Vertenten, MSC menyerukan berita itu ke dunia luar hingga mendapat tanggapan pemerintah pusat Batavia (Jakarta) pada 1921. Itulah *tig anim* pertama.

Megaproyek MIFEE dipandang Leo sebagai *tig anim* tahap kedua. Menghadapi wabah ini, Leo tidak tinggal diam. Dia bersama kawan-kawannya berusaha mengantisipasi permasalahan tersebut dengan membentuk Solidaritas Papua Tolak MIFEE (Solpatom), yang kini berubah nama menjadi Forum Sumawoma, yang terdiri dari pemuda-pemuda wilayah Distrik Tubang yang telah terdidik (mengenyam pendidikan universitas). Anggota Sumawoma memiliki visi dan misi serta keprihatinan yang sama, yakni mempertahankan tanah mereka dari semua bentuk investasi dan korporasi. "Tidak ada lagi jual-jual tanah," demikian ungkap Leonardus Deonggat Moyuwend, seorang sarjana S1 Ilmu

Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma, Merauke, yang memilih menjadi kepala kampung Bibikem. Leo merupakan salah satu anak Marind yang didaulat secara adat untuk menjaga tanah adat dan budaya suku Marind.

Dari kacamata psikologi sosial, ditemukan adanya *mass disenchantment*, yakni suatu bentuk kekecewaan massal yang tergores pada "kesadaran sosial" Marind Anim. Ungkapan lumrah yang sering terdengar dari mulut orang Marind adalah *matohale*, suatu tuturan nyaring kesadaran sosial akan hilangnya harga diri, kekaburan identitas, dan kehilangan keseimbangan kosmik serta potret suram masa depan Marind Anim di tanah sendiri. *Matohale* adalah suatu bentuk apatisme sosial yang lahir akibat hilangnya keseimbangan hidup orang Marind yang tergusur oleh proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta demografi yang menyepelekan budaya, adat istiadat, dan mentalitas mereka.

Buku *Korporasi & Politik Perampasan Tanah* karya Laksmi A. Savitri ini muncul pada saat yang tepat. Mengapa? Penulis buku ini, peneliti universitas terkemuka di Indonesia, memberikan potret riil berdasarkan data akurat dan analisis yang tajam. Ia berupaya memadukan seluruh aspek kemanusiaan Marind Anim secara seimbang dalam konteks rencana pembangunan pemerintah (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yang disebut sebagai politik perampasan tanah, dalam tautan dengan adat istiadat dan mentalitas Marind Anim yang kurang digubris dalam proses investasi yang mempercepat keterasingan dari tanah sendiri. Proses marginalisasi yang diakibatkan oleh perampasan dipandang sebagai hasil dari

benturan dua sistem ekonomi, yakni sistem kapitalis yang diusung korporasi (yang menekankan modal besar, infrastruktur, dan pasar) dan pola ekonomi subsisten (tangan mulut) (yang berskala kecil, tradisional, musiman, dan tanpa modal) yang dianut oleh kaum Marind Anim. Benturan mana pola ekonomi tangan mulut telah dimangsa tanpa ampun oleh pola kapitalistik.

Yang menarik dari buku ini, pembaca dibiarkan menilai secara bijaksana untuk menjawab keluhan Marind Anim yang berteriak "kami bosan miskin!" agar pembangunan di tanah Marind Anim tidak berorientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menjawab krisis pangan nasional dan dunia, tetapi menjadikan Marind Anim menemukan identitas diri kembali sebagai Anim-Ha, manusia sejati. ❑

Bagian Pertama

SUMATERA SENTRA PRODUKSI DAN PENGOLAHAN HASIL BUMI DAN LUMBUNG ENERGI NASIONAL, FOKUS PADA CPO, KARET, DAN BATUBARA; JAWA PENDORONG INDUSTRI DAN JASA; KALIMANTAN PUSAT SEKTOR MIGAS, MINYAK KELAPA SAWIT, DAN BATUBARA; SULAWESI DAN MALUKU UTARA ADALAH PUSAT PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, DAN PERTAMBANGAN NIKEL; BALI DAN NUSA TENGGARA ADALAH PINTU GERBANG PARIWISATA
2015

1. MIFEE: Mimpi Memberi Makan Dunia

SUATU revolusi besar cara memproduksi makanan telah berlangsung untuk ketiga kalinya di Indonesia semenjak abad-abad penjajahan kolonial dan Revolusi Hijau. Model pertanian pangan yang awalnya bertumpu pada kerja keluarga petani—setelah dieksploitasi melalui Tanam Paksa di zaman penjajahan Belanda, lalu seusai proklamasi kemerdekaan diorganisasi melalui program-program Revolusi Hijau seperti Bimbingan Massal (Bimas), Intensifikasi Massal (Inmas), dan Intensifikasi Khusus (Insus)—sekarang diambil alih menjadi kerja korporasi.

Pertanian keluarga skala kecil beralih menjadi bisnis skala besar dengan modal besar yang berorientasi pada keuntungan besar. Kata "besar" menjadi kunci dari alasan perampasan kerja produksi petani menjadi kerja korporasi. Lebih besar, lebih efisien. Dibayangkan bahwa dengan modal uang yang banyak,

yang biasanya dimiliki oleh korporasi besar, bisa dilangsungkan proses produksi yang lebih massal dan seragam karena dihasilkan oleh berbagai mesin pertanian yang canggih, bukan oleh tenaga kerja yang kurang terdidik. Kekuatan uang juga berarti penguasaan tanah skala luas, dengan harapan akses terhadap produksi pun berlimpah dan bisa menjamin keuntungan yang besar. Kalaupun gagal produksi, tanah akan selalu merupakan investasi yang tidak pernah merugi.

Dengan cara berpikir seperti itu, maka dibentuk konsep produksi makanan yang disebut oleh Kementerian Pertanian (2010) sebagai *food estate*, yakni pengkonsentrasian areal produksi bahan pangan di satu lokasi dalam luasan tanah yang besar. Tujuannya, menciptakan industri pertanian modern untuk mencukupi kebutuhan pasar domestik dan global dengan menggunakan teknologi modern, berbasis ilmu pengetahuan modern, dan dikelola secara modern. "Besar dan modern" lebih efisien daripada "kecil dan tradisional". Benarkah begitu? Mengapa cara produksi makanan seperti ini dianggap lebih penting dan lebih baik dibandingkan cara produksi sebelumnya?

Konsep *food estate* tidak datang tiba-tiba di Indonesia. Pada masa-masa pembentukan negara pembangunan (*developmental state*), demi memutus ketergantungan pada negara mantan penjajah, maka prinsip swasembada pangan yang dianut negara-negara yang telah merdeka dari penjajahan melahirkan bukan saja intensifikasi pertanian melalui Revolusi Hijau, melainkan juga upaya ekstensifikasi. Pertanian pangan awalnya bertumpu pada rumah tangga petani kecil. Merekalah yang menjadi target habis-

habisan dari penggunaan bibit unggul, pupuk, dan pestisida untuk memacu produksi. Swasembada beras di masa Orde Baru tercapai pada 1984 setelah hampir lima belas tahun Revolusi Hijau dijalankan dan ditandai dengan penghargaan yang diberikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) pada 1985. Tetapi, lima tahun setelah itu Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras.

Kenyataan tersebut membuat strategi ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian dalam skala masif menjadi pilihan berikutnya. Perluasan dan pengkonsentrasian produksi pangan di Indonesia ditandai antara lain dengan pembukaan "sawah sejuta hektare" di Kalimantan Tengah. Megaproyek yang dimulai pada 1996 dan berakhir pada 1999 ini mengalami kegagalan dan meninggalkan situs kerusakan sosial ekologis akibat pembongkaran gambut dan pencerabutan warga setempat dari tata sosial budaya dan lingkungannya (*Tempo* 8 Oktober 2003).

Kini *food estate* dihadirkan kembali bukan hanya karena ingin mengejar-ngejar swasembada beras, melainkan juga secara progresif mempromosikan pemanfaatan peluang pasar. Peluang ini dinilai terbuka ketika krisis pangan dan energi pada 2007–2008 melanda hampir seluruh dunia. Pada 2007, terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disebabkan oleh berbagai alasan, baik produksi yang menurun karena cadangan minyak bumi semakin berkurang maupun permainan spekulatif para pelaku pasar. Sebagai bahan baku dan sumber energi untuk bermacam jenis industri dan jaringan transportasi, kenaikan BBM otomatis menyebabkan meroketnya harga pangan dunia. Pangan mahal mendatangkan kepanikan, terutama bagi negara-negara yang tidak

punya cukup tanah untuk memproduksi makanan. Akibatnya, negara-negara yang punya banyak uang, tapi sedikit kekayaan alam, mulai berbondong-bondong mencari tanah di negeri orang lain, termasuk di Indonesia.

Kondisi tersebut mendatangkan ide bagi pemerintah Indonesia untuk "mengubah krisis menjadi peluang". Peluang pasar ini harus dimanfaatkan supaya dengan segera menghasilkan produksi bahan makanan dan sumber energi hayati dalam jumlah besar dan cepat. Hanya korporasi, bukan keluarga petani, yang dianggap mampu mengorganisasi cara produksi seperti ini. Karena itu, dibentuklah cara produksi terkonsentrasi dalam skala luas berbasis korporasi dan diikat dalam program nasional bernama *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE).

Jika kita teropong posisi MIFEE dengan menggunakan perspektif mata burung,[1] maka kita bisa melihat bahwa, di level nasional, MIFEE bahkan hanya merupakan salah satu bagian dari satu rancangan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).[2] MIFEE direncanakan akan menjadi salah satu motor penghasil laba pada koridor ekonomi Maluku-Papua, salah satu dari enam koridor yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap region. Indonesia ibarat restoran yang siap menjual berbagai macam makanan dan MIFEE adalah salah satu menu yang siap disajikan kepada investor asing dan domestik. Karena itu, kehadiran MIFEE dalam MP3EI membuktikan keterikatan Indonesia dalam sistem produksi pangan global yang berlandaskan akumulasi kapital (disebut sebagai rezim

pangan global)[3] dan telah menempatkan orang Marind (Yeinan dan Kanum) menjadi bagian dari mesin produksi kapital.

Lalu, siapa yang mendapat keuntungan dan siapa yang dirugikan? Hubungan-hubungan baru orang dengan tanah dan hubungan ketenagakerjaan seperti apa yang akan terbangun ketika MIFEE terwujud? Semua ini menjadi tanda tanya besar ketika konsep *food estate* tiba-tiba diterapkan di daerah yang mana warganya bukanlah petani.

Program *food and energy estate* didaratkan di Merauke pada 2010 dalam bentuk pengalokasian sekitar dua juta hektare tanah Merauke untuk dikelola 46 perusahaan menjadi perkebunan skala luas, baik perkebunan padi, tebu, maupun perkebunan kayu untuk kebutuhan energi terbarukan (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 2010). Persoalan terbesar adalah siapa pemilik tanah di Merauke? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada orang yang hidup di Merauke, jawabannya adalah orang Marind (termasuk orang Yeinan dan Kanum). Tetapi, jika kita telusuri dalam produk kebijakan, jawabannya adalah tanah dikuasai oleh negara.

Di tengah kontradiksi soal tuan tanah sesungguhnya di Merauke, muncul pertanyaan: dalam kondisi seperti apakah tanah-tanah ini bisa tersedia, atau mungkin tidak bisa tersedia, untuk kepentingan program *food and energy estate*? Proses dan mekanisme seperti apa yang berlangsung dalam rangka menguasai tanah dan tenaga kerja untuk produksi pangan dan energi skala besar ini? Efek apa yang telah ditimbulkan sejauh ini? Bagaimana mereka yang telah kehilangan tanah menghadapi kehidupan baru mereka? Bagaimana pula proses mereka yang mempertahankan tanah?

Mencoba untuk mencari jawab atas pertanyaan-pertanyaan ini dan memahami segala proses perubahan yang sedang berlangsung di Merauke adalah tugas yang diemban oleh enam bab buku ini. Bab pertama menjelaskan siapa yang disebut sebagai Anim-Ha dan kehidupannya di masa lalu. Bab kedua sampai kelima menjelaskan proses-proses perubahan yang sudah dan sedang terjadi, berikut akibat yang memorak-porandakan kehidupan Anim-Ha. Tetapi, kondisi buram itu diwarnai juga oleh usaha dan semangat meneguhkan hak atas kehidupan yang sedang mereka perjuangkan sebagaimana digambarkan dalam bab keenam. Pesan yang disampaikan oleh Kepala Distrik Okaba menutup buku ini dengan harapan agar orang Marind dan tanahnya tak pernah berpisah selamanya. ❑

Bagian Kedua

2. Anim-Ha: Manusia Sejati

TUBUH Marind/Malind[4] besar, tegap, dan kuat. Orang Marind, warga Merauke yang berdiam di tanah itu sejak alam diciptakan, terkenal sebagai kaum yang perkasa. Mereka menjelajah Papua bagian selatan dari Sungai Fly di Papua Nugini sampai ke Pulau Kimaam, suatu jarak yang tak terbayangkan mampu ditempuh kaki manusia modern (van Baal 1966; Knauft 1993; Samkakai 2009). Menyeberangi kali seluas laut yang dihuni buaya sebesar kapal. Mampu merentang busur sekeras baja dan melempar lembing secepat semburan butir peluru. Manusia Marind menyebut diri mereka sebagai Anim-Ha, manusia sejati. Begitu tinggi identitas diri yang dijadikan sebagai representasi kemanusiaan Marind.

Salah satu bukti keperkasaan dan intelektualitas orang Marind adalah daya menciptakan sistem bedengan[5] atau *wambadla* untuk

menyiasati lingkungan yang sering "kelebihan air" agar mereka bisa tetap bertanam dan berkebun secara intensif semasa musim hujan. Bedengan ini tidak tanggung-tanggung, bisa panjang dan lebar bermeter-meter, padahal dibuat hanya dengan menggunakan alat berupa sekop dari kayu. Kemampuan ini merupakan bagian dari unjuk tanggung jawab lelaki Marind menyediakan lahan bagi perempuan Marind untuk berkebun pisang, ubi, keladi (*aghakbak*), dan lebih penting lagi adalah untuk menanam *wati*, tanaman yang sangat sentral dalam budaya Marind.[6] Hampir seluruh ritus hidup, misalnya upacara penyerahan tanah, upacara perkawinan dan kematian, serta musyawarah adat dan denda adat, membutuhkan *wati* sebagai penanda keabsahannya.

Orang Marind melakukan budidaya pertanian, tapi mereka tidak menetap. Perpindahan kerap harus dilakukan karena situasi alam yang ekstrem. Tanah darat bisa berubah menjadi rawa sedalam empat meter di musim hujan, tapi sekering lapangan bola di musim panas. Karena itu, perjalanan leluhur Marind yang ekspansif menyebabkan persebaran orang dan tanahnya dalam skala yang sangat luas. Seperti di bagian lain tanah Papua, tak ada sejengkal pun tanah di wilayah Marind yang tak bertuan. Semua bertuan dan semua dalam kerangka tanggung jawab menjaga dan menyiapkan cadangan tanah dan sumber kekayaan alam bagi generasi berikutnya.

Dalam adat Marind, hubungan manusia dengan alam dan manusia lain bertemu dalam sistem perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung dalam wilayah teritorial adat, selain juga dipertemukan oleh nilai dan praktik-praktik spiritual.

Manusia Marind, yang terbagi dalam beberapa marga dan sub-marga, tak hanya memiliki hak atas wilayah masing-masing, tapi satu sama lain sama-sama memikul kewajiban dan tanggung jawab yang terkait dengan ikatan rantai primordial (kekeluargaan) antara sesama mereka dan alam sebagai perwujudan dari nenek moyang.

Dengan demikian, terdapat dua bentuk hubungan yang harus dicermati dalam pola hubungan masyarakat Marind dengan sumberdaya alam, yaitu hubungan material dan hubungan spiritual. Secara material berupa sistem pemanfaatan sumberdaya alam yang mereka terapkan secara adat; secara spiritual berupa totemisme serta kepercayaan lain terhadap alam berdasarkan mitologi yang mereka miliki. Kedua sistem hubungan ini sangat berbeda satu sama lain, tapi tidak bisa dipisahkan atau ditiadakan salah satunya. Hanya dengan keduanya, konsep Anim-Ha (manusia sejati) yang ada dalam eksistensi ke-Marind-an akan terwujud. Mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Hubungan Orang dan Tanah: Sistem Tenurial

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang lahir dari hubungan material antara manusia Marind dan alam adalah sistem pemanfaatan dan perlindungan yang menjamin terpenuhinya segala kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Marind, yang saat ini telah jauh meninggalkan bentuk-bentuk kehidupan masa lampau dan semakin bergeser ke arah lebih modern, tidak bisa begitu saja dianggap tak memegang lagi adat. Pergeseran budaya yang antara lain ditandai oleh hadirnya berbagai fasilitas kehidupan modern, fenomena-fenomena penjualan tanah adat, atau semakin me-

lebarnya akses dan ruang interaksi mereka dengan dunia luar memang membuka kemungkinan bagi sistem adat untuk semakin tak dihiraukan. Tetapi, hal tersebut juga bukan berarti begitu saja bisa dijadikan sebagai pijakan dalam melihat budaya Marind saat ini.

Alam, yang secara lebih spesifik adalah tanah, secara adat masih senantiasa menjadi pijakan sistem kehidupan Marind. Berbagai konsep adat yang mengatur sistem tenurial hingga saat ini masih berlaku dan sebagian besar belum berubah, dari hak kepemilikan dan penguasaan marga hingga pembagian tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, pembahasan tentang masyarakat adat tidak akan bisa terlepas dari nilai-nilai dasar yang membentuk nalar dan pola kehidupan mereka sejak masa-masa lampau hingga saat ini. Dalam pembahasan ini, kita akan memasukinya melalui sistem tenurial yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut.

Verschueren (1970) telah menjelaskan fungsi tanah bagi masyarakat adat Marind sebagai dasar dari segala sistem kehidupan yang berlaku bagi mereka. Tanah Marind yang telah terbagi merupakan milik masing-masing marga dan berdiri di atas dua sistem hak, yaitu hak kepemilikan dan hak pakai. Kedua hak ini secara umum memiliki ketentuan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang berada di tangan individu atau perseorangan, melainkan berada di tangan semua anggota marga secara komunal sebagai wujud dari kedaulatan kaum, yang dalam hal penanggungjawaban pembagian dan penggunaan diserahkan kepada kepala marga. Sedangkan yang berlaku bagi setiap masyarakat dalam satuan rumah tangga

adalah hak pemanfaatan yang terbatas di antara sesama anggota marga.

Kita tidak akan mendapati pekarangan yang ditanami sayur-mayur atau kebun-kebun palawija di sekitar perkampungan orang Marind. Sebab, kebun biasanya terletak dekat dengan dusun sagu dan berada di luar perkampungan. Saat ini bertani bukanlah kegiatan yang menjadi sumber kehidupan terpenting bagi orang Marind. Verschueren (1970) menganalisis bahwa di masa lalu orang Marind melakukan kegiatan pertanian sebagai kegiatan utama dalam kehidupan karena, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga didorong oleh kebutuhan untuk membuat sajian di acara-acara ritual. Alasan inilah yang menyebabkan kegiatan bertani menjadi semakin tidak penting ketika hampir seluruh ritual orang Marind dilarang dan dihentikan melalui penyebaran agama. Ketika ritual-ritual orang Marind masih berjaya, mereka dikenal memiliki teknologi pembuatan bedeng-bedeng tanam untuk mengatasi penggenangan karena kebun mereka terletak di daerah rendah di tepian sungai atau rawa (*wambadla* dan *aghakbak)*. Biasanya mereka bercocok tanam pisang, umbi-umbian, kelapa, termasuk sagu. Tanaman sagu bukan merupakan tanaman yang hidup liar di alam Merauke. Hutan sagu yang ada sekarang merupakan hasil penanaman yang dilakukan oleh orang Marind sejak bergenerasi lalu.

Sumber utama kehidupan orang Marind dari dulu hingga sekarang berasal dari kegiatan berburu dan menangkap ikan. Tetapi, meski orang Marind tidak melakukan kegiatan budidaya berbasis tanah secara intensif, kepemilikan dan penguasaan tanah diatur dengan sangat rinci dalam kehidupan sosial mereka. Sagu

dan kelapa menjadi penanda utama hak kepemilikan marga atas tanah dan tanaman karena berasal dari investasi tenaga kerja yang dilakukan oleh moyang setiap klan orang Marind.

Hal yang unik dari pengorganisasian sosial kehidupan orang Marind adalah perpaduan antara kepemilikan berbasis marga dan nilai serta orientasi komunal mereka yang sangat kuat. Meskipun mereka memiliki pembagian yang ketat atas tanah dan tanaman, tapi seluruh kegiatan berkebun, mencari ikan, dan berburu dilakukan secara komunal. Karena itu, memahami struktur sosial yang terkait dengan sistem penguasaan tanah menjadi penting karena tidak bisa kita lihat secara kasat mata dari kehidupan sehari-hari mereka.

Seluruh tanah orang Marind terbagi atas kepemilikan oleh *boan* (marga atau klan). Batas tanah antara satu marga dengan marga lain ditandai dan diketahui dengan jelas, baik oleh marga itu sendiri maupun marga tetangga. Kampung, sebagai satuan tempat tinggal, biasanya terdiri dari beberapa marga, tidak hanya satu marga. Batas tanah antarmarga dalam satu kampung pun diketahui dengan jelas, termasuk kepemilikan setiap jengkal dusun sagu dan setiap pohon yang ditanam. Tetapi, hak kepemilikan tanah berada di tangan *boan* atau marga, bukan anggota marga. Anggota *boan* hanya memiliki hak pakai. Seorang kepala marga, yang disebut *pakas-anim*, memiliki tanggung jawab untuk mengelola hak atas tanah di antara sesama anggota marga dan hubungan pemilikan/penguasaan marga dengan pihak luar.

Pengaturan ini juga berlaku pada hak atas wilayah perburuan dan pemancingan. Hanya anggota marga yang bisa melakukan

perburuan atau pengambilan ikan di wilayah marganya. Seseorang tidak bisa melakukan perburuan atau pencarian ikan di wilayah marga lain, kecuali jika diundang. Biasanya undangan pun diberikan oleh marga pemilik kepada satu marga lain dalam konteks kelompok, bukan perseorangan. Dalam perburuan atau pencarian ikan bersama, hanya marga pemilik yang boleh melepaskan anak panah atau menjaring ikan; marga lain hanya membantu. Setelah perburuan berakhir, marga pemilik pun berhak atas potongan bagian yang terbaik dari binatang buruan mereka.

Verschueren (1970) juga mencatat bahwa hak untuk melepaskan kepemilikan ada di tangan persekutuan marga-marga yang menetap dan membuka pertama suatu wilayah yang menjadi kampung mereka. Misalnya, di satu kampung ada marga Basik-basik dan marga Balagaize, yang merupakan submarga dari marga Basik-basik. Maka, submarga Balagaize tidak bisa begitu saja menyerahkan tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan dari marga Basik-basik. Sebaliknya, jika marga Balagaize berkebun kelapa atau menanam sagu, maka kelapa dan sagu itu tidak bisa begitu saja tersedia bagi marga Basik-basik, meskipun marga Basik-basik adalah marga utama. Dengan demikian, karena tenaga kerja merupakan investasi, kepemilikan tanah secara komunal terletak di tangan marga besar dan kepemilikan tanaman yang ditanam terletak di tangan submarga atau anggota marga. Tetapi, ketika suatu wilayah yang mencakup teritori beberapa marga akan diserahkan kepada pihak lain, maka keputusan tersebut ada di tangan persekutuan marga dan harus melalui proses musyawarah kaum

yang melibatkan seluruh golongan dari empat penjuru mata angin (*Mayo, Imo, Sosom, Ezam*).[7]

Tanah, yang diasosiasikan sebagai tempat asal, merupakan salah satu elemen identitas yang menjadi penanda hak atas tanah dan melekat pada nama orang. Di antara susunan nama orang Marind sebelum nama marga, dilekatkan nama tempat dari mana moyang mereka pertama kali menetap dan membuka kampung. Dengan mendengar nama seorang Marind, orang Marind yang lain akan tahu dari mana saudaranya berasal dan siapa moyangnya. Penamaan ini berlaku untuk lelaki, tidak untuk perempuan.

Dalam sistem sosial yang patrilineal, tidak ada hak kepemilikan perempuan Marind atas tanah. Ikatan perempuan dan tanah hanya terletak pada personifikasi tanah sebagai mama yang memberi kehidupan pada anaknya. Ketika perempuan Marind menikah, mereka tetap dianggap sebagai anggota marga lain yang datang ke marga suami. Meskipun perempuan Marind tetap tinggal di *boan* suami jika suaminya meninggal, mereka tidak secara otomatis memiliki hak atas tanah peninggalan suami. Kalau ia memiliki anak laki-laki, hak pakai akan diturunkan kepada anak laki-laki. Apabila ia kembali ke keluarga orangtuanya setelah sang suami meninggal, ia bisa meminta izin untuk mengolah tanah bapak atau saudara lelakinya. Sepanjang bersuami-istri, sang istri berhak memanen dan membantu sang suami bercocok tanam. Jika ia diizinkan membuka kebun sendiri di tanah marga suami, maka hasil panen menjadi haknya. Apabila ia meninggal, anak-anaknya berhak atas tanaman yang ia tanam.

Dalam perkembangannya, hak kepemilikan atas tanah saat ini masih berada di tangan marga. Tetapi, kepemimpinan *pakas-anim* sudah tidak ada lagi. Pengambilan keputusan lebih banyak diserahkan kepada ketua adat atau orang yang dituakan di antara marga di satu kampung dan dalam marga itu sendiri. Pelepasan tanah untuk digunakan oleh pihak lain juga sering melupakan keharusan untuk dilakukan melalui musyawarah kaum/suku. Perubahan-perubahan inilah yang belakangan mendatangkan masalah agraria, yang berwujud konflik terbuka disertai kekerasan, ketegangan, pertentangan, penyingkiran, sampai pembunuhan.

Hubungan Spiritual: Totemisme

Jika tanggung jawab hidup manusia Marind dalam hubungan material telah mengatur sistem penguasaan dan pemanfaatan sumber alam demi terpenuhinya hak dan terjalaninya kewajiban di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia Marind dalam konteks spiritual terhubung erat dengan nilai yang terkandung dalam simbolisme benda-benda atau kehidupan alam yang melingkupi hidup mereka sehari-hari, yaitu totem. *Totem* merupakan penjelmaan dari *dema*, asal mula dari kehidupan Marind.

Nilai yang terkandung dalam *totem-totem* bergerak dalam sistem bahasa yang menandai adanya realitas simbolik yang berjalan dalam sistem kesadaran manusia Marind, melahirkan mekanisme pertanggungjawaban terhadap alam, dan menghubungkan mereka dengan *dema*. Boelaars (1986) menjelaskan bahwa *dema*

merupakan mitologi asal usul manusia Marind, mencipta dan mengatur, tapi dianggap tak berpengaruh lagi setelah berlalunya masa pendahuluan mitis (beberapa tahun pertama kehidupan manusia hingga kanak-kanak). *Dema-dema* itulah yang tersimbol dalam budaya totemisme dan memiliki kedudukan yang setara dengan manusia.

Sebuah kalimat penting terucap dari seorang tetua di kampung Domande. *Kami juga mau kami punya hidup maju. Tapi kalau hutan ditebang habis, baru kasuari, buaya, ke mana?* Kalimat itu hanyalah satu dari berbagai ungkapan serupa yang sering disampaikan oleh para tetua adat dan pemuda Marind. Jika kalimat tersebut kita pahami dengan menggunakan logika modern yang positivistik, bisa dipastikan bahwa itu akan dimaknai sebagai bentuk kearifan lokal yang sangat peduli pada keberlangsungan sistem ekologi. Dengan demikian, tidak ada jawaban yang paling tepat dari kegelisahan tersebut kecuali program konservasi. Sementara itu, kita banyak melihat bagaimana secara kontradiktif program-program konservasi justru cenderung mendudukkan warga sebagai perambah, pemburu, dan perusak hutan, bukan sebaliknya.

Dalam budaya Marind, apabila ungkapan semacam itu dilanjutkan atau ditelusuri, kita akan menemui bukan hanya nama kasuari dan buaya, melainkan sederetan panjang nama-nama dari hampir semua benda, binatang, tumbuhan, dan peristiwa alam yang ada serta terjadi di atas kehidupan tanah Marind. Semua telah menjadi *totem*, terstruktur secara simbolik dan menjadi dasar dari identitas ke-Marind-an. Bagi mereka, setiap benda,

binatang, tumbuhan, dan peristiwa alam merupakan perwujudan dari *dema-dema* yang mereka percaya. Di dalamnya terkandung kedirian Marind yang telah terbagi menjadi marga-marga inti (Gebze, Kaize, Mahuze, Basik-basik). Setiap marga terkait langsung secara eksistensial dengan *totem* masing-masing yang berbeda, tapi justru saling melengkapi dan menjaga.

Adapun totemisme yang terbagi dan terkait sesuai dengan empat marga inti yang disebut di atas adalah: Gebze: tanah, manusia, kelapa, pisang, tumbuh-tumbuhan hutan, kanguru, tebu, umbi-umbian; Kaize: api, akar *wati*, kasuari; Mahuze: orang laki-laki, matahari, bulan purnama, anjing, cendrawasih, elang, ular hitam, lipan, sagu, bambu, bulu tuyu (sejenis bambu kecil sebesar rotan yang biasa digunakan sebagai senjata perang); Basik-basik: air, orang perempuan, ayam hutan, pinang, ikan-ikan, buaya, halilintar/petir, bulan sabit.[8]

Dalam realitas keseharian, hubungan yang terjalin antara manusia Marind dan *totem-totem* telah melahirkan suatu mekanisme timbal balik dengan alam yang setara. Kalaupun hubungan tersebut pada praktiknya menghasilkan sistem yang bisa disebut sebagai pelestarian lingkungan, hal itu hanyalah konsekuensi logis yang muncul dari sistem kehidupan spiritual yang lebih dalam. Perhatian penuh manusia Marind terhadap benda-benda, binatang, tumbuhan, dan peristiwa alam yang menjadi *totem* adalah suatu pemaknaan pada hubungan yang terjalin antara mereka dan *dema-dema* asal yang mereka yakini, yang ujungnya adalah pertanggungjawaban eksistensial terhadap identitas diri mereka sebagai Anim-Ha. Jadi, ungkapan pertanyaan tetua di Domande

di atas tak bisa begitu saja kita maknai dalam arti nilai manfaat, melainkan harus kita terima sebagai gugatan identitas. Sebab, misalnya, ketika menyebut kasuari, maka yang akan terpanggil datang bukanlah seekor burung, melainkan seluruh manusia Marind marga Kaize.

Tuturan tentang Anim-Ha ini baru mengungkap sebagian kecil saja perihal identitas Marind. Masih banyak yang belum diungkap karena sejarah Marind diwarnai juga oleh tabu dan larangan untuk membuka adat. Tetapi, justru karena "misteri" jati diri Anim-Ha itu, maka jika kita melihat hotel megah berbintang empat berdiri di tengah kota Merauke, timbul pertanyaan yang mengusik hati dan pikiran: bagaimana Sang Manusia Sejati menghadapi berbagai perubahan yang datang sebagai pembangunan dan kemajuan? Di mana dan ke mana Anim-Ha pada hari ini? ❑

3. Mimpi Pembangunan dan Kemajuan

Ketika pemberadaban, diikuti oleh modernisasi, dibayangkan sebagai cara satu-satunya menuju pencerahan, maka dua kata kunci selalu dijadikan jalan untuk keluar dari kegelapan, yakni pembangunan dan kemajuan. Tetapi, ke mana arah kemajuan? Maju merayakan kehidupan atau mundur membentur matinya kemanusiaan?

APA yang dimaksud dengan pembangunan? Wacana orang biasa tentang pembangunan yang terkonstruksi sejak zaman Sukarno dan diteruskan oleh Soeharto, Sang Bapak Pembangunan, diukur dengan ada atau tidaknya gedung bertingkat, jalan lebar beraspal, hotel mewah, padatnya jumlah mobil di badan jalan, dan gemerlapnya lampu mal dan pertokoan. Sekarang ukuran tersebut ditambah dengan gaya hidup instan dan serbacepat.

Manusia kota-desa makan cepat dengan mi instan dan hidup cepat dengan sokongan komunikasi bebas galau (telepon genggam) dan transportasi bebas hambatan (motor).

Pembangunan dengan ukuran tersebut pada hari ini juga hadir di Merauke. Di kota, Merauke sedang berpatut diri untuk sampai pada sebutan "modern" dengan dibangunnya jalan lebar beraspal mulus mengitari kota dan bangunan yang terbaru adalah hotel berbintang empat yang dikelola manajemen ternama berkelas internasional. Di kampung, sedang terjadi pembersihan lahan dari hutan-hutan tua tradisional dan rawa sarang nyamuk untuk menjadi kebun-kebun luas pohon akasia yang akan diolah menjadi bubur kertas dan ribuan hektare kebun tebu untuk memasok beberapa pabrik gula yang akan dibangun di tanah penduduk. Perubahan menuju kemajuan menjadi dambaan dan penantian panjang penduduk Merauke.

Tidak mengherankan ketika harapan akan perubahan menjadi roh kepemimpinan Bupati Merauke John Gluba Gebze pada 2001 sampai 2010 lalu. Selama Bupati Gebze menjabat, tidak dapat dipungkiri sudah banyak pembangunan fisik yang dikerjakan. Jalan-jalan di kota menjadi luas, licin tak berlubang, pun taman kota bersih tak bersampah. Banyak jalan sekunder dan tersier yang menghubungkan kampung-kampung lokasi transmigrasi dengan kota Merauke menjadi mulus dan mudah tempuh. Padahal, sepuluh atau lima belas tahun lalu, masuk kampung berarti siap berkubang lumpur dan tahan banting menempuh jarak dekat dalam waktu panjang. Pada ulang tahun ke-100 Merauke pada 2007, Bupati Gebze mencanangkan tahun itu sebagai Tahun Investasi. Investasi

pertanian dan kehutanan skala luas menjadi bentuk pembangunan yang akan mengubah kampung-kampung menjadi kota-kota kecil. Merauke sedang membangun menuju kemajuan!

Namun, jika hari-hari ini kita duduk di salah satu bangku kota dari pagi sampai petang dan mengamati mereka yang lalu-lalang di jalan, keluar-masuk toko dan perkantoran, maka sulit kita temukan saudara-saudara berambut keriting berkulit hitam ada di situ. Kala senja mulai turun, waktu meja-meja kecil berisi satu set komplet tumpukan buah pinang dengan sirih dan kapur mulai bertebaran di pinggir jalan, kita lihat saudara kita satu-satu keluar berbelanja pinang. Tak luput dari pandangan adalah anak-anak usia 6–10 tahun telanjang kaki berlarian masuk-keluar toko atau menanti di pintu toko menengadahkan tangan dengan mata bulat dan bulu mata sangat lentik sembari berkata, "*Seribukah*...." Mereka mengemis. Mereka yang lain, atau mereka yang *liyan,* berusaha menikmati kota dengan menghirup udara malam, sambil menyenangkan hati melalui kunyahan segenggam pinang seharga Rp5.000. Mereka, bangsa Marind, para pemilik tanah, telah menjadi orang lain—*Sang Liyan*, di Tanah Air sendiri.

Pembangunan, *katanya,*[9] sejak dulu sudah datang di kampung. Hadir di tanah-tanah penduduk, baik di tempat saudara-saudara yang datang dari Jawa puluhan tahun maupun di tempat saudara-saudara kaum pemilik tanah Merauke: bangsa Marind (Yeinan dan Kanum). Di tanah-tanah yang telah berubah menjadi kampung-kampung transmigran, pembangunan hadir sebagai hamparan sawah yang membentang luas dengan jalan-jalan kampung yang relatif baik. Sapi-sapi bergerombol di padang penggembalaan.

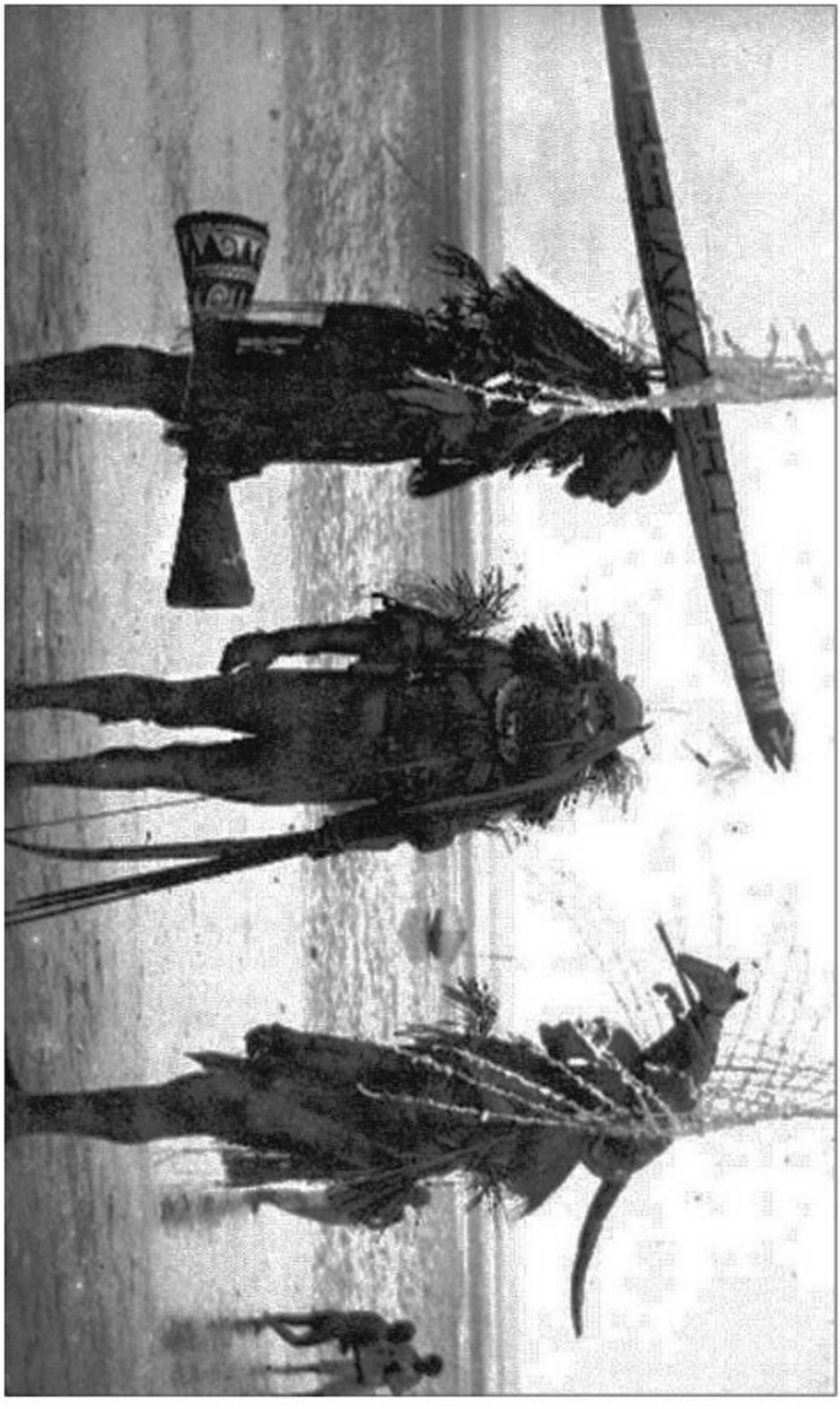

Gambar 1 Orang Marind 1905–1925 (Sumber: Corbey 2010)

Anak-anak sekolah saling teriak berbahasa Jawa naik sepeda atau motor, berjalan pulang dengan seragam rapi berwarna biru-putih. Ada SD, SMP, dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu).

Memasuki jalan tanah yang kering, tandus, dan berdebu ketika kemarau dan berlumpur liat mencengkeram kaki saat musim hujan, lalu menyeberang sungai dengan menggunakan perahu dayung atau *belang*, bisa juga *longboat*, untuk mengarungi sebagian rawa atau menyusuri kali yang seluas laut, barulah kita sampai di perkampungan kaum Marind di sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke. Lalu kita akan bertemu perkampungan orang Yeinan, Kanum, dan Wambon (Mandobo) di ujung Wasur sampai ke Distrik Ulilin. Di tempat-tempat itu, kita tak menemukan sawah, jalan aspal, atau anak sekolah berseragam rapi beramai-ramai naik sepeda, apalagi motor. Kadang kala sekolah libur tiga bulan karena ibu atau bapak guru tak ada; mereka sedang di kota. Jika sakit atau mau melahirkan dan mencari ibu bidan, sering harus ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) distrik, baru dapat menemuinya. Jadi, guru *tara ada,* bidan *biasa tara ada.* Kepala distrik jarang datang ke kampung. Orang kampung tidak tahu seperti apa wajah bapak atau ibu kepala distrik. Pembangunan tak terlihat hadir di kampung orang Marind: Yeinan, Kanum, dan Wambon (Mandobo).

Ketimpangan pembangunan (*the uneven development*) telah menyebabkan datang dan hadirnya pembangunan secara tidak sama antara di kota dan kampung, bahkan antarkampung. Kampung transmigran "lebih maju" ketimbang kampung lokal yang "tertinggal". Di kota Merauke banyak bangunan bertingkat, sementara

kampung lokal banyak yang masih mengalami isolasi geografis. Kondisi-kondisi tersebut telah memungkinkan diterimanya alasan untuk memajukan "kampung lokal yang tertinggal" dengan mengubah tanah-tanah penduduk menjadi perkebunan industrial melalui investasi skala besar. Jika perkebunan industrial dibangun, maka diharapkan kampung-kampung tertinggal itu bisa berubah menjadi kota kecil berjalan aspal, berpenerangan sepanjang waktu, dan kendaraan besar-kecil bisa keluar-masuk kampung bebas hambatan. Siapa yang tak terpukau dengan mimpi seperti itu? Tetapi, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kemajuan dan ketertinggalan? Jika ketertinggalan itu disebabkan oleh ketimpangan pembangunan, apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan?

Ketertinggalan lahir sebagai sebuah makna sosial negatif karena kemajuan—dikonstruksi dan direpresentasikan oleh hidup modern sebagai standar kelayakan minimal—diperlawankan dengan hidup primitif. Standar "maju sama dengan modern" tersebut mencakup: bersekolah, menganut satu di antara lima agama yang diakui oleh negara, berpakaian dan beralas kaki, tinggal di rumah terbuat (minimal) dari papan beratapkan seng beralas tanah yang dihuni oleh keluarga batih, memiliki penghasilan berupa uang, melakukan pekerjaan budidaya atau menerima gaji sebagai pegawai, memiliki jamban, kamar mandi, atau minimal sebuah sumur di lokasi rumah. Jika profil warga kampung belum memenuhi standar ini, maka predikat sebagai masyarakat tertinggal akan melekat pada kampung itu. Apalagi, seiring waktu, kepemilikan benda-benda modern, seperti kendaraan bermotor dan telepon genggam, menjadi ukuran baru kemajuan. Pikatan benda-benda modern

ini menjadikan hasrat warga kampung lokal untuk memiliki uang sebagai pembeli barang mahal menjadi kuat. Bahkan, di satu kampung yang rata-rata orang tua dan pemudanya tidak bisa membaca, mereka berkeras mengumpulkan uang untuk membeli telepon genggam yang lantas difungsikan sebagai alat pemutar lagu. Dimensi material dan kultural dari makna kemajuan dan ketertinggalan bagaikan mata uang dengan dua sisi, sulit untuk dipisahkan.

Secara spasial, kampung transmigran atau kampung yang didominasi oleh penduduk pendatang pada umumnya terletak dekat dengan pusat-pusat perhubungan ke kota, misalnya di titik penyeberangan sungai, muara sungai, dekat pelabuhan pantai, dan pinggir jalan beraspal. Kampung lokal umumnya terletak di belakang kampung-kampung ini dan lokasinya lebih menjorok ke dalam. Setiap kali warga kampung lokal bepergian keluar kampung, mereka akan melewati kampung-kampung pendatang. Di situ mereka akan melihat cara berpakaian, gaya hidup saudara-saudara pendatang, berbagai macam barang yang terpajang di kios besar yang menjual barang-barang dari kota atau luar Merauke, dan berbagai merek motor yang hilir-mudik di jalan. Dengan bantuan pendidikan di sekolah, interaksi dengan pendatang, dan propaganda pemerintah tentang kemajuan, semua visualisasi tersebut diterima oleh nalar warga kampung sebagai bentuk kehidupan yang lebih baik, maju, dan modern.

Warga kampung lokal bukan orang malas dan miskin. Jika saja ukuran diambil dari segi produktivitas warga, setiap minggu warga di kampung darat (*deg*) bisa menghasilkan 200 kilogram daging

rusa, di kampung pantai (*duf*) menghasilkan 144 botol minyak kelapa dan 200 kilogram kopra, serta di kampung sekitar kepala Kali Bian bisa menghasilkan lembar karet sebanyak 50 kilogram per minggu per keluarga. Mereka bekerja giat.

Namun, pihak yang mengambil keuntungan dari hasil kerja mereka adalah para pengumpul dan tengkulak warga pendatang yang membeli produk warga untuk dijual kembali ke kota atau pengumpul besar. Rantai rente yang menguras hasil kerja warga kampung lokal berpusat di kampung-kampung transmigran/pendatang dan di kota. Daging rusa di kampung dibeli oleh pengumpul yang datang dari luar kampung dengan harga Rp15.000 per kilogram dan dijual di toko di Merauke dalam bentuk dendeng seharga Rp130.000 per kilogram. Terasi 1 galon di kampung dibeli pedagang Makassar Rp12.000 saja, sementara di kota dijual di toko seharga Rp140.000 per kilogram. Semua kios dan warung makan dimiliki oleh pendatang di setiap jalur utama perhubungan: jalan darat, penyeberangan sungai, dan pelabuhan pantai/muara (periksa Bagan 1).

Tidak mengherankan apabila rumah permanen dua lantai, motor mewah dan traktor, serta kemampuan menyekolahkan empat anak ke universitas swasta di Jawa hanya bisa dirasakan oleh penduduk kampung transmigran/pendatang.[10] Sementara itu, warga kampung lokal yang sudah terbiasa makan nasi, tapi tidak biasa bersawah, harus membeli beras di kios kampung yang didatangkan dari kota Merauke. Pinang juga dibeli di kios kampung yang mendapat pasokan dari pasar di Merauke dan merupakan hasil impor pedagang Merauke dari Makassar. Apabila

melihat perputaran uang dari hasil kerja warga kampung yang diserap lagi ke kota, bisa kita bayangkan bahwa konsentrasi laba semakin ditarik menjauhi kampung dan berpusat di luar Merauke. Penghisapan sumberdaya kampung ke kota inilah yang menjadi salah satu sumber penyebab ketimpangan, apalagi diperkuat oleh konstruksi budaya yang membentuk nalar kemajuan dan ketertinggalan. ❑

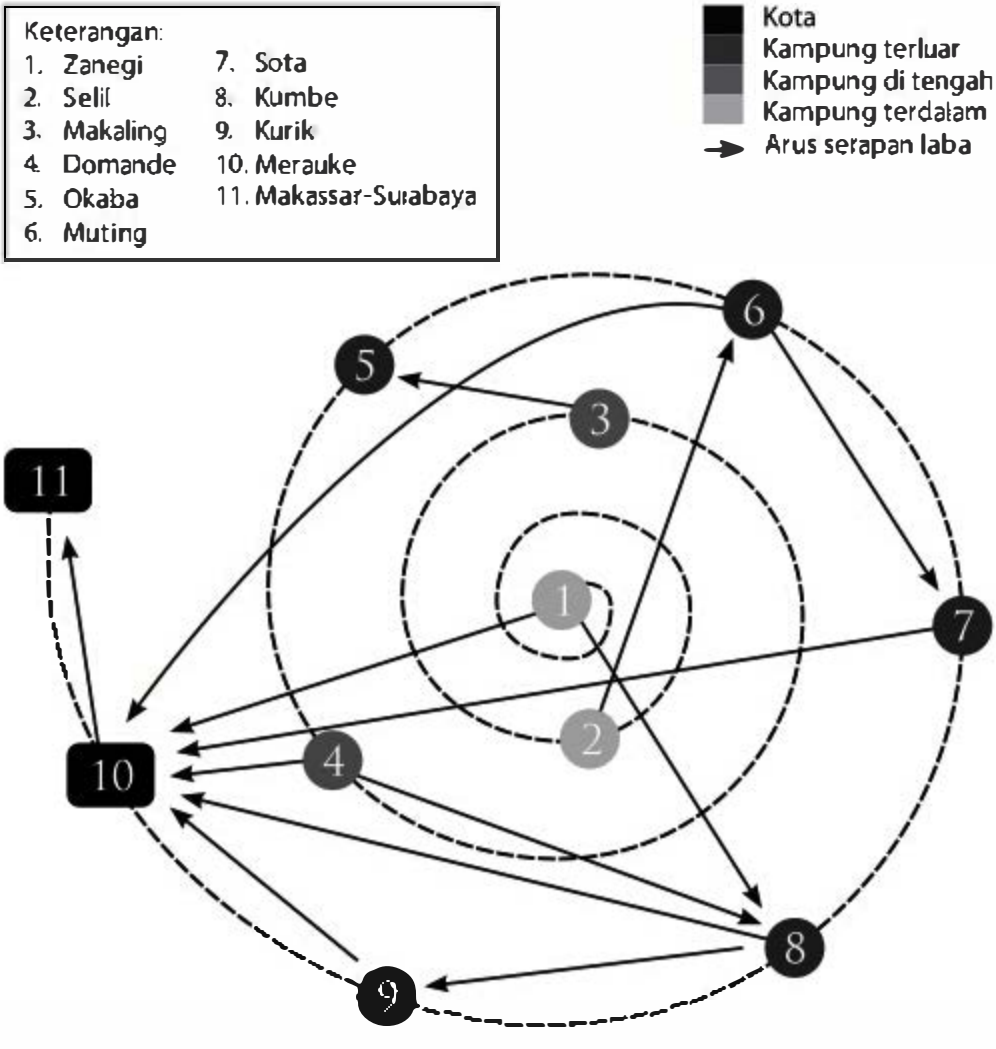

Bagan 1 Serapan Laba dari Kampung ke Kota

Bagian Ketiga

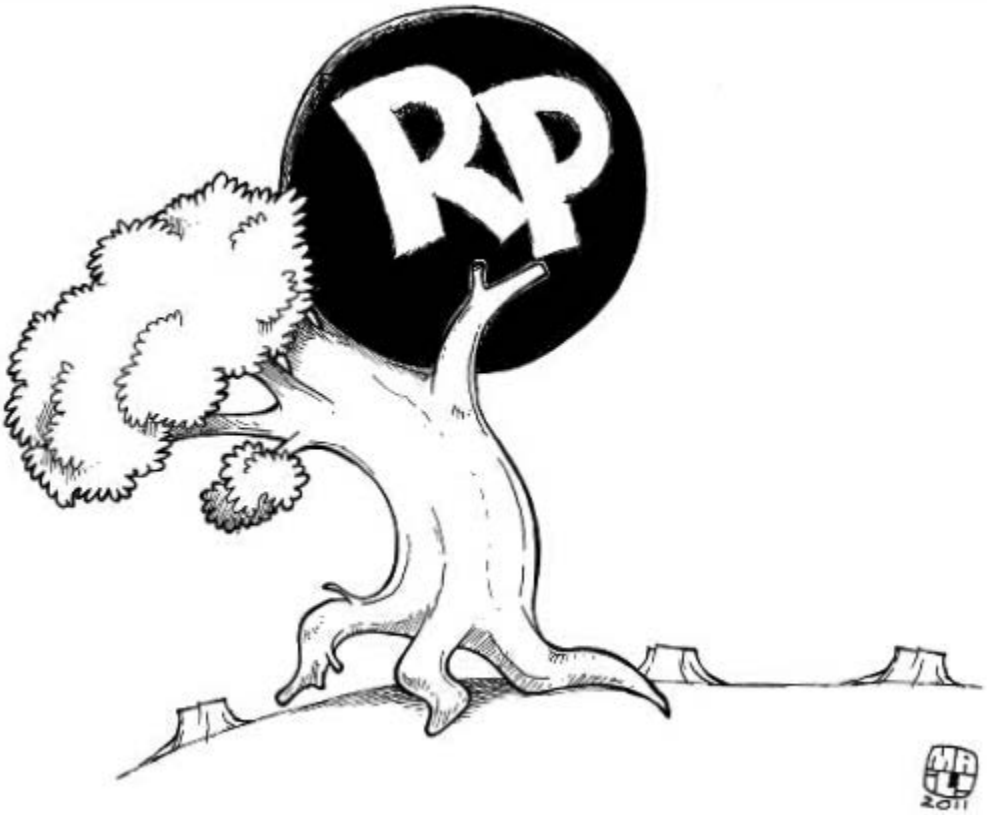
RP
2011

4. Gelombang Besar Perubahan

> Dulu tak berbaju adalah tak beradab, sekarang meski sudah berbaju, tapi lusuh, masih berarti miskin. Dulu tak sekolah berarti tak maju, sekarang biar sudah sekolah harus punya motor dan telepon genggam agar menjadi modern.

KEBANGGAAN manusia Marind sebagai manusia sejati telah berulang kali diuji dan mengalami berbagai hantaman arus keras perubahan. Arus perubahan dimulai dengan datangnya pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan pos di Merauke pada 1902. Kedatangan pemerintah kolonial Belanda merupakan jawaban atas komplain pemerintah Inggris terhadap serangan kaum Marind ke wilayah-wilayah Papua Nugini yang saat itu dikuasai Inggris. Sejak itu, mulailah kaum Marind berhadapan

dengan proses besar pemberadaban (*civilization*). Sendi-sendi kultur Marind berubah dengan drastis, mulai dari atribut, ritual, sampai kehidupan di dalam lingkup keluarga batih yang sedianya menyusun diri Anim-Ha. Diri Anim-Ha telah digugurkan. Kenyataan itu menanamkan rasa "kekalahan", kekecewaan yang mendalam, sehingga lahir sikap tak peduli yang disebut *matohale*. Sikap ini disalahmaknai sebagai malas, tak mau berubah, dan tak pernah memikirkan masa depan (Dinas Sosial Kabupaten Merauke 1970; Overweel 1992).

Proses perubahan kehidupan kaum Marind terjadi secara bergelombang. Secara garis besar, seorang intelektual Marind, Frumensius Obe Samkakai,[11] menyebutkan terpaan perubahan dalam sejarah hidup Marind terbagi atas tiga gelombang. Pertama, sejarah *dema*: suatu masa ketika orang Marind belum mewujud menjadi manusia. Kedua, sejarah suku: saat manusia pertama hadir dan menyebar menjadi suku-suku di wilayah Trans Fly dan salah satunya adalah kaum Marind. Ketiga, sejarah Merauke: waktu mulai diubahnya kehidupan suku menjadi kehidupan manusia modern dengan datangnya agama dan pemerintah, termasuk mulai diubah dan menghilangnya nama tanah yang melekat pada nama manusia Marind.

Sejarah bisa diwakili oleh mereka yang disebut tokoh. Misalnya, sejarah perjuangan diwakili oleh cerita kepahlawanan tokoh. Sejarah juga bisa dibentuk oleh mereka yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan dan kekuasaan pemerintahan. Misalnya, sejarah Gerakan 30 September 1965 yang dikait-kaitkan oleh pemerintah Orde Baru dengan pemberontakan Partai Komunis

Indonesia (PKI). Tetapi, sejarah juga bisa merupakan tuturan dari kehidupan orang-orang biasa (awam) yang menceritakan pengalaman mereka dalam menjalani berbagai kejadian di masa lampau yang dirasakan memengaruhi kehidupan. Model terakhir ini, yakni sejarah yang dibentuk dari tuturan orang biasa, dipilih sebagai alat untuk mengungkap proses perubahan yang terjadi dan dirasakan oleh orang Marind.

Secara khusus bagian ini menampilkan tuturan orang Zanegi dan Domande tentang sejarah kehidupan mereka. Kaum di kedua tempat itu, selain mengalami gelombang pemberadaban yang dirasakan oleh semua orang Marind di tanah Merauke, juga mengalami perubahan khusus yang diakibatkan oleh gelombang baru pembangunan bernama MIFEE. Sejarah Zanegi dan Domande dimulai dari sejarah suku karena *sejarah dema sudah dibawa pergi generasi yang lalu, orang-orang tua tutup mulut sebab itu merupakan masa lalu yang sudah ditutup*.[12] Kemudian disambung dengan sejarah Merauke, yang dibagi menjadi periode-periode yang didasarkan pada ingatan penutur sejarah.

Sejarah Suku

Orang Zanegi menceritakan bahwa pada awalnya moyang mereka berasal dari dua suku, yakni Ayu Eze dan Ndimar Eze. Pada masa ini mereka masih menerapkan budaya mengayau[13] sebagai bagian dari ritus mereka, berpakaian cawat dan tempurung kelapa. Perempuan dan laki-laki hidup terpisah. Ada rumah khusus untuk semua perempuan dan rumah khusus pula bagi semua laki-laki. Mereka baru bersatu ketika dikawinkan. Sumber

penghidupan berasal dari sagu yang mereka tanam serta berburu babi, kanguru, dan binatang lain.

Sementara itu, di Domande, orang Domande mengatakan bahwa awalnya ada manusia pertama, yaitu Konda. Ia membagi-bagi kawasan tersebut menjadi wilayah tempat tinggal bagi tiga komunitas subsuku. Pertama, orang Ndahud La yang tinggal di tepian pantai, yang merupakan orang Domande asli. Kedua, orang Imayau Anim yang tinggal di lokasi dusun sagu sekarang, yang dulu berupa perkampungan di dalam hutan bernama Wanggal. Ketiga, orang Maemi Lahik yang tinggal di perkampungan bernama Ndalim yang terletak di pantai.

Mereka hidup dari bercocok tanam di kebun dengan menanam pisang, ubi, keladi, dan sagu. Semua sagu ditanam sehingga menjadi milik keluarga. Selain itu, mereka juga berburu babi, kanguru, dan kasuari dengan menggunakan panah serta menangkap ikan dengan peralatan tradisional tombak, alat perangkap yang disebut *aupla* dan jaring (*kipe*). Menurut cerita orang tua di Domande, rusa baru ada pada 1954. Verschueren (1970) mencatat, rusa memang binatang introduksi pemerintah Belanda.

Sejarah Merauke

Periode Misionaris dan Pemerintah Belanda

Masuknya agama melalui misionaris ke Zanegi dan Domande memiliki kisaran waktu yang hampir sama. Orang Domande mengingat bahwa misionaris pertama datang ke kampung mereka pada 1915. Di Zanegi, pastor yang pertama kali datang bernama Petrus Partente,[14] yang berasal dari Biak. Baik di Domande maupun

Zanegi, misionaris mendorong agar terjadi penyatuan dari beberapa subsuku menjadi satu kampung. Di Zanegi, penyatuan kampung ditujukan untuk menghilangkan budaya mengayau. Di Domande, mereka sama sekali tidak menyebut secara jelas tentang budaya mengayau. Terkesan bahwa budaya mengayau menjadi hal yang enggan disebut secara terang-terangan karena di Zanegi pun awalnya mereka menyebut sebagai budaya "kuno". Setelah ditanya mengenai budaya kuno yang dimaksud, barulah mereka memperjelasnya sebagai mengayau.[15]

Orang Domande tidak menceritakan penyatuan ketiga subsuku di Domande secara rinci. Sebaliknya, di Zanegi, tua-tua Zanegi mengingat dengan detail momen yang mendorong sehingga akhirnya kedua moyang mereka bisa bersatu. Cerita tentang pembunuhan pedagang Cina yang ingin bertukar burung kuning[16] dengan tembaga, lalu dibunuh oleh moyang mereka karena si pedagang Cina tidak memberikan imbalan pertukaran yang setara, adalah cerita yang diyakini menjadi pemicu bersatunya kedua moyang. Pembunuhan ini menyebabkan datangnya polisi Belanda, yang mereka sebut sebagai *pu anim*. Serbuan polisi membuat mereka bersatu untuk mempertahankan diri. Kejadian ini mendatangkan paksaan untuk membentuk satu kampung yang diberi nama Dunti. Dipilihlah kepala kampung dan mandor kampung, masing-masing dari kedua suku tersebut, pada 1940-an. Di Domande, mereka sudah memiliki satu kepala kampung sejak 1920-an.

Sekolah di Domande didirikan pertama kali oleh misionaris pada 1923. Tidak dijelaskan apa yang diajarkan di sekolah pada masa itu,[17] tapi orang Domande mengatakan bahwa sekolah buta

huruf atau pertama kali yang mengajarkan baca tulis baru ada pada 1965. Guru-guru didatangkan dari Kei dan ada dua sekolah, yaitu SD YPK (Kristen) dan YPPK (Katolik). Kedua sekolah selanjutnya digabung menjadi satu karena guru-guru dari YPPK sudah tidak ada lagi, kembali ke Maluku. Di Zanegi, setelah sekolah didirikan oleh pastor pertama, mereka sempat mengalami kekosongan guru selama bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena peristiwa pembunuhan pedagang Cina yang menyebabkan bantuan guru dihentikan oleh pemerintah Belanda. Baru bertahun kemudian Zanegi memiliki lagi guru di kampung. Pada masa-masa tidak ada guru, bapak-bapak di kampung mengajar anak-anak mereka.

Pada 1940–1950-an, orang Zanegi mulai mengenal "budaya melayu", ditandai dengan: pakaian, lampu petromaks, dan lampu minyak. Tetapi, pakaian-pakaian itu hanya dipakai pada saat-saat tertentu. Saat berkebun atau berburu ke hutan, mereka tetap mengenakan "pakaian alam". Pada masa ini masyarakat pindah ke kampung kedua yang bernama Ndaramit. Saat itu mereka masih menggunakan dua bahasa sebagai bahasa keseharian.

Periode Indonesia (NKRI)

Kemarau panjang menyebabkan orang Zanegi berpindah-pindah, sampai akhirnya menetap di kampung Zanegi yang sekarang. Pada saat itulah, sekitar 1972, pemilihan kepala kampung pertama kali diadakan dalam konteks administrasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada waktu itu bernama Desa Anim-Ha, yang terdiri dari kampung Zanegi, Baad, Wayau, dan Koa.

Di Domande, peralihan pemerintahan sangat dirasakan warga. Peristiwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sempat mengakibatkan warga tercerai-berai dan sebagian lari ke Papua Nugini. Setelah kondisi mereda, atas inisiatif masyarakat, kampung mereka yang terletak di pinggir pantai dan tergerus abrasi dipindahkan lebih masuk ke dalam, yakni ke lokasi kampung Domande yang sekarang. Pemindahan ini terjadi pada sekitar 1972.

Pada masa-masa ini, kedua kampung akhirnya menempati lokasi yang menetap dan mulai memiliki struktur pemerintahan kampung, selain ketua adat dan kepala marga yang ada sejak dulu.

Periode Transmigrasi dan Bantuan (Orde Baru)

Pada periode ini masyarakat kampung Zanegi pertama kali mengalami "penggusuran". Pada 1983–1984 dilakukan pembuatan jalan dari Kali Bian sampai Zanegi, dikerjakan oleh perusahaan kontraktor AGT, dan dari Kali Kumbe sampai Zanegi oleh PT Irian Sutama. Pembuatan jalan ini menjadi bagian dari penyiapan lahan bagi program transmigrasi. Ketika itu masyarakat digusur tanpa ada penjelasan sama sekali dengan diberikan uang Rp90.000 per kepala keluarga. Uang ini cukup untuk membeli sepeda. Hanya saja, meskipun lahan transmigrasi sudah disiapkan dan jalan dibangun, tidak ada transmigran yang datang dan lahan tetap kosong.

Bagi kedua kampung, periode ini juga ditandai dengan masuknya beragam jenis bantuan. Di Zanegi, pada awal 1990-an, masuk bantuan pembangunan desa (Bangdes) berupa ternak sapi, ayam, bahkan sampai pesawat televisi, parabola, genset, sepeda, dan

gergaji mesin. Semua disalurkan lewat kepala desa. Tetapi, karena Desa Anim-Ha saat itu terlalu luas, bantuan itu tidak tersebar dengan baik. Program bantuan berikutnya adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang memberikan peralatan kerja seperti kapak, parang, dan cangkul kepada masyarakat secara berkelompok.

Di Domande, program IDT masuk pada 1992 dan memberikan bantuan berupa dana kelompok. Masyarakat membentuk tiga kelompok sesuai dengan kegiatan yang diinginkan mereka, yaitu kelompok pertanian (kacang-kacangan dan kebun sawi), nelayan (jaring ikan), dan ternak (sapi, kambing, itik). Sampai hari ini ternak ayam masih terlihat di rumah-rumah. Bantuan berikutnya datang dari program ABRI Masuk Desa (AMD) pada 1996. Mereka membangun rumah baru dari papan untuk masyarakat, juga menyebarkan bibit tanaman buah untuk ditanam. Saat ini, di pekarangan-pekarangan rumah, masih banyak ditemukan pohon nangka, mangga, dan jambu.

Selain itu, dari segi kelembagaan pemerintahan kampung, pemerintah membentuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dari tingkat provinsi sampai desa sehingga ada orang yang ditunjuk menjabat sebagai Ketua LMA. Dengan demikian, di kampung, ada ketua adat, yang biasanya diangkat dari marga yang paling tua, ketua marga, dan Ketua LMA. Struktur seperti itu bertahan sampai hari ini.

Periode Bupati Gebze (Reformasi)

Memasuki 2000, kampung Zanegi mendapat bantuan perumahan dari Dinas Sosial. Bantuan rumah berdinding papan

dan beratap seng sampai hari ini masih digunakan. Satu rumah biasa ditinggali lebih dari satu keluarga.

Pada 2001, pertama kali Kabupaten Merauke memiliki bupati orang Papua asli, yaitu John Gluba Gebze. Pada periode ini Program Perbaikan Kampung (PPK) datang di Zanegi disusul dengan bantuan beras untuk warga miskin (raskin). Pada kurun waktu yang sama, PPK juga hadir di Domande dengan pembuatan sumur-sumur serta saluran air (drainase), juga pengembangan kelompok usaha industri minyak kelapa dan kopra yang sampai sekarang masih ada, dengan harga jual kopra Rp4.000 per kilogram. Pembuatan sumur dan parit bertambah pada 2005 dengan diterimanya dana hibah sebagai bantuan dari Provinsi Papua. Sebagai penunjang dari program introduksi perkebunan jambu mete, infrastruktur di Domande semakin lengkap dengan adanya pembangunan jalan pada 2007 yang diprakarsai oleh Dinas Perkebunan.

Bentuk bantuan serupa dalam periode ini juga datang di Zanegi, yakni program penanaman palawija dari Dinas Pertanian yang bekerjasama dengan PT Agrindo dalam pembuatan demplot penanaman jagung. Demplot kurang berhasil karena masyarakat cenderung memasukkan terlalu banyak biji jagung dalam satu lubang tanam sehingga tumbuh terlalu rapat. Akhirnya, karena penanaman gagal, traktor kecil diberikan kepada masyarakat. Karena traktor kecil itu dianggap kurang memadai, masyarakat mengajukan permintaan kepada pemerintah dan diberikan traktor yang lebih besar, ditambah beras 2 ton untuk mereka yang bekerja di area percontohan.

Periode MIFEE

Dalam kurun waktu yang berdekatan, yaitu dari 2005 hingga 2007 di Zanegi dan 2008 di Domande, kedua kampung ini mulai berhadapan dengan proses sosialisasi masuknya perusahaan, seiring dengan diberikannya janji-janji yang menggambarkan keuntungan bagi masyarakat, yaitu oleh grup perusahaan Medco di Zanegi dan grup perusahaan Rajawali di Domande. Grup Medco beroperasi di wilayah Kali Bian melalui dua anak perusahaan, yaitu PT Selaras Inti Semesta yang memegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Nomor 18/Menhut-II/2009 dengan total luas 169.400 hektare dan PT Medco Papua Industri Lestari yang memusatkan operasi di kampung Buepe dengan total areal 2.800 hektare untuk pengembangan industri *wood chips* dan *wood pellet*. Dua perusahaan ini sudah beroperasi sejak 2009 dan sudah melakukan penebangan lebih dari 3.000 hektare hutan. Grup Rajawali memegang izin lokasi untuk usaha perkebunan tebu seluas 37.500 hektare di Distrik Marind dan Kurik atas nama dua anak perusahaan, yaitu PT Cendrawasih Jaya Mandiri dan PT Karya Bumi Papua. Grup Rajawali memulai kegiatan dengan pembibitan dan pembuatan jalan operasional.

Kehadiran perusahaan di Zanegi, menurut tua-tua adat, diawali pada 2005 dengan datangnya dua orang konsultan perusahaan yang membawa peta (citra satelit) untuk melakukan pemetaan wilayah-wilayah sakral selama seminggu penuh bersama masyarakat. Pada 2006–2007, wakil perusahaan datang dengan membawa komitmen perusahaan yang sampai sekarang belum dipenuhi. Janji-janji yang

diberikan Medco kepada masyarakat antara lain: dibangunkan balai kampung, gereja, balai adat, sanggar budaya, mengangkat tenaga guru, memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi, akan mengolah hutan berikut manusianya, membuat yang tidak tahu menjadi tahu, memberikan makan tiga kali sehari. Salah seorang tetua kampung mengatakan bahwa *akhirnya janji-janji itu hanyalah mitos.*

Awalnya, karena percaya pada janji tersebut, ditambah pada 2008 Bupati Gebze menjanjikan langsung bahwa Zanegi akan dijadikan kota kecil jika masyarakat mau menerima perusahaan, maka pada 15 Desember 2008 masyarakat pun menerima "uang ketuk pintu" 300 juta rupiah. Kemudian, tanpa memahami dengan baik, ketua marga telah menandatangani surat perjanjian dengan PT Selaras Inti Semesta. Isi surat itu menyetujui masuknya perusahaan pengambilan kayu dengan nilai penggantian Rp2.000 per meter kubik.

Pada Januari 2009, perusahaan mulai menggusur hutan untuk membuat kantor di Mayo. Pada April 2009, Arifin Panigoro diangkat oleh bupati menjadi anggota marga Gebze. Tetapi, karena masyarakat merasa banyak janji perusahaan belum terwujud, masyarakat menolak perusahaan. Hasilnya, kepala kampung dibawa ke Wasur untuk bertemu dengan bupati. Sepulang dari sana, kepala kampung terpaksa menyatakan menerima perusahaan.

Tenaga kerja yang direkrut PT Selaras Inti Semesta dari Zanegi hanya 49 orang. Kebanyakan ditempatkan sebagai petugas kebersihan dan penanaman. Status ketenagakerjaan mereka sebagai buruh harian dengan upah Rp50.000 per hari. Lembur

pada dasarnya tidak dibayar karena upahnya Rp4.000 per jam, tapi jam kerja harian dibatasi sampai pukul 15.00. Lamaran diproses selama tiga bulan, baru kemudian diterima, itu pun harus dengan ancaman dulu. Bahkan, ada yang bertahun-tahun belum ditindaklanjuti. Padahal, masyarakat merasa dijanjikan bahwa seratus persen orang Zanegi akan menjadi karyawan di perusahaan. Tenaga kerja dari Zanegi yang memegang alat berat baru 3 orang, itu pun masih sebagai pembantu. Sementara itu, orang-orang dari luar Zanegi cepat diangkat sebagai karyawan tetap. Di sisi lain, yang sudah dinikmati oleh orang kampung Zanegi dari PT Selaras Inti Semesta adalah bantuan genset dan solar untuk penerangan seluruh kampung, itu pun sudah rusak dan belum diganti.

Di Domande, grup perusahaan Rajawali mulai mengadakan sosialisasi pada 2008 dan hasilnya pada 2010 disepakati oleh seluruh ketua dari tujuh marga bahwa perusahaan diterima masuk di wilayah Domande yang telah diberikan untuk dikelola menjadi perkebunan tebu. Sebuah tugu dipancangkan di jalan masuk kampung. Di tugu tersebut disebutkan sepuluh janji perusahaan untuk pembangunan sarana kampung, di antaranya sarana ibadah dan sekolah adat. Tugu ini ditandatangani wakil perusahaan, ketua ketujuh marga, dan penjabat sementara bupati saat itu. Grup Rajawali memberikan uang sebesar 6 miliar rupiah (dari 7 miliar rupiah yang diajukan oleh masyarakat) kepada ketujuh marga sebagai "uang tali asih" dan 1 miliar rupiah dialokasikan untuk membangun sarana-prasarana kampung, tapi belum terlaksana.

Melacak Jejak *Food Estate*

Kehadiran proyek *food and energy estate* di Merauke bukan tanpa asal usul. Alasan utama yang membenarkan konsep ini diterapkan di Merauke adalah keberadaan jejak proyek padi Kumbe pada 1954. Pemerintah Belanda pada masa itu memberikan konsesi pada perusahaan swasta asing untuk membuka areal seluas 10.000 hektare untuk ditanami padi. Pembukaan areal diawali dengan 60 hektare di wilayah Kurik sampai Kumbe sebagai plot demonstrasi atau percobaan. Irigasi dan pintu air pun dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengairan (Beck 1957). Proyek ini merupakan konsorsium usaha swasta yang melibatkan pengusaha dari lima negara, antara lain Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat, demikian tutur Samder Rubun, seorang mantan pegawai perusahaan padi di Kurik (Koembe Rijst Bedrijft) yang pada saat itu, 1956, menduduki jabatan sebagai asisten akuntan perusahaan.

Menurut *Paitua* Samder, saat itu belum ada tenaga kerja yang didatangkan dari luar. Semua kerja dilakukan oleh orang-orang setempat (Muyu, Marind) yang diajarkan cara mengoperasikan mesin-mesin, mulai dari traktor untuk membuka lahan, membajak, sampai mesin-mesin untuk pembibitan dan pemupukan yang didatangkan dari Italia. Hasil produksi padi pada 1956 mencapai 32 lori, yang diangkut dari Kurik ke Merauke melalui jalur rel yang dibangun oleh perusahaan dengan batang-batang rel yang didatangkan dari Australia. Satu lori berkapasitas kurang lebih 1 ton, sehingga total produksi mencapai sekitar 32 ton. Produksi beras itu dikirim sampai ke Holandia (sekarang Jayapura) dan Biak. *Rice estate* ini berproduksi mulai dari 1956 sampai 1962,

Gambar 2 Bekas Emplasemen Koembe Rijst Bedrijft (Foto: Laksmi A. Savitri)

bahkan awalnya direncanakan untuk dikembangkan sampai ke perkebunan tebu. Usaha ini berhenti ketika terjadi peralihan pemerintahan dari Belanda ke Indonesia.

Saat ini emplasemen pabrik, tempat pengeringan, gudang, dan perumahan karyawan masih ada di Kurik. Pada masa Orde Baru, situs padi Kurik ini berubah menjadi Balai Benih Industri, dengan wilayah kendali penanaman mencakup 60 hektare (seperti awal pembukaan areal ini).

Jejak proyek padi Kurik itulah yang dipungut Bupati Gebze sebagai bukti sejarah kejayaan pengusahaan padi oleh korporasi berskala luas di Merauke dan diajukan dalam kemasan konsep *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE) pada 2001. Berawal dari MIRE, usai digodok Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum, beranjak menjadi MIFEE: megaproyek yang diusung oleh empat belas kementerian.

Berlandaskan janji dan mimpi akan masa depan yang lebih baik, proyek MIFEE diprediksi akan mendatangkan gelombang besar perubahan kehidupan Marind Anim, melampaui apa yang bisa terbayangkan (Zakaria *et al.* 2010). Ragam pendapat tentang dampak yang ditimbulkan, baik secara sosial maupun ekologis, telah dipaparkan sebagai kritik atas megaproyek ini, mulai dari ancaman akan hilangnya 200.000 hektare hutan alam perawan sampai ancaman genosida karena arus banjir pendatang (Zakaria *et al.* 2010; Greenomics Indonesia 2012).

Namun, proyek *food and energy estate* ini tetap bergeming. Beberapa pemberitaan di media massa menggambarkan adanya

"pemindahan" lokasi proyek dari Merauke ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dikarenakan sulitnya pengadaan lahan (*The Jakarta Post* 5 Februari 2010, 12 Juli 2012; *Media Indonesia* 8 Januari 2011). Sebenarnya kata yang paling tepat untuk itu bukanlah "pemindahan", melainkan "perluasan" rencana *food estate*: dari hanya satu lokasi menjadi beberapa lokasi di Indonesia. Yang pasti, MIFEE di Merauke belum berhenti.

Sejarah dan Identitas Marind Anim

Sejarah dalam rentang waktu yang cukup panjang, satu abad (1910–2010), terbukti masih jernih terpatri dalam ingatan para tetua kampung, baik di Zanegi maupun Domande. Dari kesaksian atas bentuk-bentuk perubahan kasat mata yang disebut sebagai pembangunan dan kemajuan di kampung Marind, ada dua gelombang yang berpengaruh besar. Pertama, gelombang pemberadaban yang dimulai oleh misionaris dan pemerintah Belanda. Pemberadaban dilakukan melalui pendidikan, yakni dengan didirikannya sekolah-sekolah pemberadaban sekitar 1921–1937 dan sekolah rakyat (*volkschool*) yang mulai mengajarkan baca tulis pada 1946 (Majelis Waligereja Indonesia 1974). Jalan yang lain yakni melalui kekerasan dan penghukuman atas pelaksanaan pengayauan, pemakaian atribut adat, serta pelaksanaan ritual inisiasi menurut aliran kepercayaan mereka (*Mayo, Imo, Sosom, Ezam*) dan ritual-ritual lain menyangkut kepercayaan akan kesuburan. Perubahan terbesar yang dihasilkan dari semua upaya ini adalah meluruhnya sebagian besar budaya Marind sampai pada titik yang dinilai telah mengakibatkan

depresi moral bangsa Marind karena kehilangan jati diri (Overweel 1992).

Seturut dalam revolusi sosial budaya pemberadaban bangsa Marind adalah kerumitan yang timbul dari penguasaan tanah karena penyatuan kampung-kampung. Pada 1921, pastor Vertenten mengajukan sebuah proposal kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia yang disebut sebagai Rencana Pembangunan. Proposal ini bertujuan untuk mengubah tradisi Marind yang dianggap telah mengakibatkan menyebarluasnya penyakit granuloma dan menelan korban hampir sepertiga dari populasi kaum Marind, persisnya dengan cara membangun 1.100 rumah penduduk yang diperuntukkan bagi keluarga batih dan delapan sekolah sebagai tahap pertama (Majelis Waligereja Indonesia 1974). Model kampung baru ini disebut sebagai Kampung Teladan karena setiap rumah yang dibangun dimaksudkan untuk ditempati satu keluarga. Tidak ada lagi rumah laki-laki dewasa, rumah anak laki-laki, dan rumah perempuan yang tersendiri sebagaimana tradisi Marind sebelumnya. Satuan-satuan kampung yang ditinggali oleh sejumlah marga dijadikan satu dengan satuan kampung lain sehingga menjadi satu perkampungan besar.

Setiap kampung sedianya sudah memiliki tatanan sosial budaya yang mengatur siapa tuan tanah dan siapa yang bukan, siapa yang berhak memanen, menanam, dan mengambil dan siapa yang tak memiliki hak tersebut. Ketika satu kampung disatukan bersama kampung lain dengan cara mengonsolidasi permukiman di lokasi salah satu kampung, warga kampung yang datang menjadi berstatus menumpang di tanah orang lain. Kalau pada awalnya

semua menjadi tuan di tanah sendiri, setelah masa-masa penyatuan kampung, ada yang menjadi "penumpang". Artinya, ia tidak memiliki hak atas tanah yang ditinggali, kecuali hak untuk menjaga yang diberikan oleh si tuan tanah atau tuan dusun. Memang, tidak ditemukan cerita atau catatan yang menggambarkan adanya konflik besar yang disebabkan oleh perubahan pemindahan kampung dan permukiman pada masa itu. Meski begitu, bukan berarti tidak ada jejak masalah di kemudian hari.

Bagi kaum Marind, persoalan tanah bukan soal sederhana karena pelanggaran hak bisa berarti nyawa. Salah satu pengalaman buruk pernah terjadi di kampung Makaling ketika hampir sebagian besar penduduk kampung meninggal karena penyakit menular pada 1920-an. Tanah pun seakan menjadi tak bertuan karena ditinggal tewas oleh pemilik-pemiliknya. Muncullah kejadian saling klaim dari sisa-sisa anggota marga yang tertinggal. Perseteruan dipertajam dengan baku *suanggi*[18] dan menelan banyak korban. Kekhawatiran akan terulangnya pengalaman seperti ini pun terbukti setelah masuknya gelombang perubahan besar kedua, yang kembali membawa pertikaian masalah tanah.

Gelombang perubahan besar yang kedua adalah arus investasi skala besar yang ditandai dengan masuknya perusahaan-perusahaan yang menawarkan uang untuk pelepasan tanah-tanah Marind Anim. Kedatangan perusahaan yang menginginkan tanah menimbulkan perbedaan pandangan di antara kaum Marind. Ada yang ingin menyerahkan, ada pula yang tidak. Tentu saja keputusan penyerahan tanah tidak sesederhana memilih antara

"iya" dan "tidak". Persoalan terbesarnya menjadi siapa yang berhak menentukan pilihan "iya" atau "tidak". Posisi penentu ini berkaitan erat dengan siapa yang berhak, haknya sejauh mana, dan apakah sudah melalui kesepakatan seluruh kaum. Tiga hal terakhir ini menjadi sumber dari pertikaian dalam keluarga, antara paman dan keponakan, antara kakak dan adik, atau antara satu kampung dan kampung lain. Peristiwa konflik tanah Sanggase-Buepe menjadi contoh nyata.

Kedatangan Medco di tanah yang diklaim sebagai milik orang Sanggase yang ditempati oleh orang Buepe telah menimbulkan kericuhan besar, baik antara orang Sanggase-Buepe dan Medco maupun di antara orang Sanggase-Buepe sendiri. Orang Sanggase menuduh orang Buepe telah menyerahkan tanah milik orang Sanggase ke Medco dan menerima pembayaran dari penyerahan tanah yang dianggap tidak sah. Orang Sanggase menggugat Medco dan meminta kompensasi yang terus dinaikkan jumlahnya karena mereka merasa tidak digubris oleh Medco. Demonstrasi dilakukan di depan kantor Medco dan akhirnya sejumlah pertemuan negosiasi dilakukan antara orang Sanggase-Buepe dan Medco.

Seiring dengan kericuhan tersebut, untuk mengklarifikasi tuan tanah yang sesungguhnya, orang Sanggase dan Buepe menggelar pertemuan adat guna menelusuri sejarah dan menentukan pihak yang sesungguhnya berhak atas tanah yang diperebutkan itu. Dari hasil pertemuan adat tersebut disepakati bahwa orang Buepe telah melakukan kekeliruan dengan menyerahkan tanah yang seharusnya dimintakan izin lebih dulu

kepada orang Sanggase. Warga kedua kampung ini pun bersatu untuk memburu dan menuntut Medco. Mereka mengistilahkan kolaborasi perburuan ini sebagai *ohan*[19].

Ternyata, hasil akhir *ohan* mereka ini tidak sesuai harapan. Dari tuntutan kompensasi yang dilambungkan sampai 65 miliar rupiah, Medco setuju membayar hanya sejumlah 3 miliar rupiah. Pada upacara penyerahan uang, orang Buepe tidak dipanggil untuk mendapat bagian dan mereka akhirnya hanya dibagi oleh orang Sanggase sejumlah 100 juta rupiah. Padahal, *ohan* yang sudah memakan waktu sembilan bulan di kota telah meninggalkan utang biaya hidup orang Buepe dan Sanggase di mana-mana yang jumlahnya sampai ratusan juta rupiah. Jeratan utang dan iri dengki karena pembagian uang yang dianggap tidak adil, baik antara orang Sanggase dan Buepe maupun di antara sesama orang Sanggase sendiri, telah menorehkan kebencian, kemarahan, pertikaian, dan memecah-belah persaudaraan di dalam dua keluarga besar ini. Kecemasan akan masalah tanah yang berujung pada baku bunuh dan kematian terus membayangi hati orang Marind.

Dua gelombang besar dalam sejarah Marind Anim datang dari luar dan melanda ke dalam. Bukan sekadar perubahan yang tampak, sesungguhnya yang terjadi: ada sekolah, gereja, jalan, jembatan, gedung-gedung, dan orang yang berpakaian rapi. Lebih dalam lagi, dua gelombang perubahan tersebut selalu menghantam kedirian Marind Anim dan menggedorkan pertanyaan "siapa saya" dan "mau apa saya". *Apakah saya masih Sang Anim-Ha ketika semua kepercayaan yang menyusun diri Anim-Ha diruntuhkan? Apakah saya sudah menjadi manusia modern dan maju? Apakah*

saya ingin menjadi karyawan di perusahaan, menyetir alat berat, truk, dan mobil agar menjadi maju?

Identitas budaya memiliki jejak dari masa lalu dan akan membentuk jalan ke masa depan, demikian menurut Stuart Hall (1993, 1996a,1996b). Identitas tidak pernah genap lengkap, penuh, dan komplet karena selalu ada celah kosong (*void*), retakan (*suture*), dan ada yang kurang (*lack*) sehingga senantiasa berada dalam proses pembentukan. Ketika diri mengada (*being*), perubahan yang datang sebagai kekuatan atau kekuasaan akan selalu menarik kembali diri dalam proses menjadi (*becoming*). Tetapi, apa yang ditorehkan masa lalu meninggalkan jejak sehingga sejarah tidak bisa dilepaskan dari proses pembentukan identitas budaya.

Dalam pergulatan pembentukan identitas Marind Anim, perkataan yang paling mengena tentang kegelisahan Marind Anim menghadapi tekanan-tekanan, yang disebut sebagai "tuntutan zaman", disampaikan oleh Kepala Distrik Okaba Jeremias Ndiken. *Malind Anim. Amam kaba. Sayang dorang. Kalau kita masuk ke rumah-rumah, mereka satu minggu baru minum gula atau satu hari hanya satu kali minum gula atau satu hari baru ada satu malam penerangan, yang lain sisa pakai ketel. Sayang, sungguh sangat sayang. Tapi tidak apa, itulah kami yang mendiami negeri ini dan kami tidak akan keluar dari negeri ini. Tetap ada di sini. (...) Kenyataan yang saya lihat di sini terlalu sedih. Tapi itu sudah. Kalau hanya mau cari harta, yah...dan mau bilang Malind Anim ini dong punya paguyuban begitu sudah biar dikasih 8 miliar, tetap saja pergi berburu. Biar datang bilang dorang kitorang bikin koperasi, biar datang dorang kasih mobil kita bikin kopra, biar kasih*

kapal, habitatnya memang begini! Dan ada saatnya segala sesuatu indah pada waktunya. Itu yang belum kita gali jiwa Malind. Indah pada waktunya itu tasangkut di mana? (...) Anak-anak sudah ada satu-dua orang yang pintar, lalu lima-delapan. Nanti dorang atur sudah investasi kowe begini-begini, nanti kowe sekian-sekian, nanti begini-begini. Nah, itu baru pas.

Jeremias Ndiken percaya bahwa pendidikan akan membentuk identitas baru Marind. Kalau sebelumnya tidak ada pengertian yang baik sehingga orang luar datang memimpin mereka, kata Jeremias, ia tetap yakin pendidikan duniawi dan pendidikan roh akan memberikan ilmu yang menjadi roh bagi perubahan kehidupan orang Marind. *Ketika saatnya datang, yaitu saat dimana Tuhan memberikan mereka pengertian yang baik, pada masa itulah mereka mampu mempertahankan hak dan menghargai jerih payah tete*[20] *moyang yang sudah berjalan ratusan kilometer mengaveling tanah bagi keturunan-keturunannya di masa depan.* Jeremias Ndiken menegaskan bahwa semua ini tak lain: *mempertahankan hak, tiada yang lain. Itu sudah.*

Namun, tidak dapat dipungkiri, gelombang kedua yang datang ini membawa kekuatan yang sulit ditampik, yaitu kekuatan uang. *Mereka yang suka belanja uang untuk beli motor, telepon genggam, pasti akan lepas tanah,* begitu pemahaman umum di antara orang Marind. Seorang ketua adat di Bupul menyebutkan alasannya: *kami bosan miskin!* Jadi, di tengah tarikan-tarikan antara keinginan untuk tetap punya hutan sebagai bagian dari kedirian Anim-Ha—sejarah *tete* moyang yang tak mungkin terhapus—dengan pikatan uang supaya menjadi maju dan modern, identitas Marind

Anim sebagai Sang Tuan Tanah tengah berada di ruang antara, mengalami kegamangan. Apakah investasi ini harus diterima atau ditolak? ❑

5. Tawaran akan Masa Depan: Marind Anim Tanpa Tanah?

EMPAT puluh enam perusahaan diundang masuk ke Merauke dalam rangka membangun dan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui megaproyek bernama MIFEE. Nama itu, MIFEE, belum pernah didengar oleh orang di kampung, sampai suatu hari ada beberapa organisasi nonpemerintah yang datang ke kampung dan bertanya kepada mereka tentang "apa itu MIFEE". Sebelum pertanyaan itu muncul, mengusik, dan mengungkap kegelisahan orang di kampung, perusahaan yang datang ke kampung dan menjanjikan perubahan disambut seperti kehadiran mesias Sang Pembebas dan mereka diterima oleh warga dengan hati terbuka. Warga kampung bertutur bahwa mereka terharu ketika orang dari perusahaan berjanji akan membantu masyarakat untuk membangun gereja, menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi, membantu penerangan kampung, air bersih, dan sebagainya. Janji ini

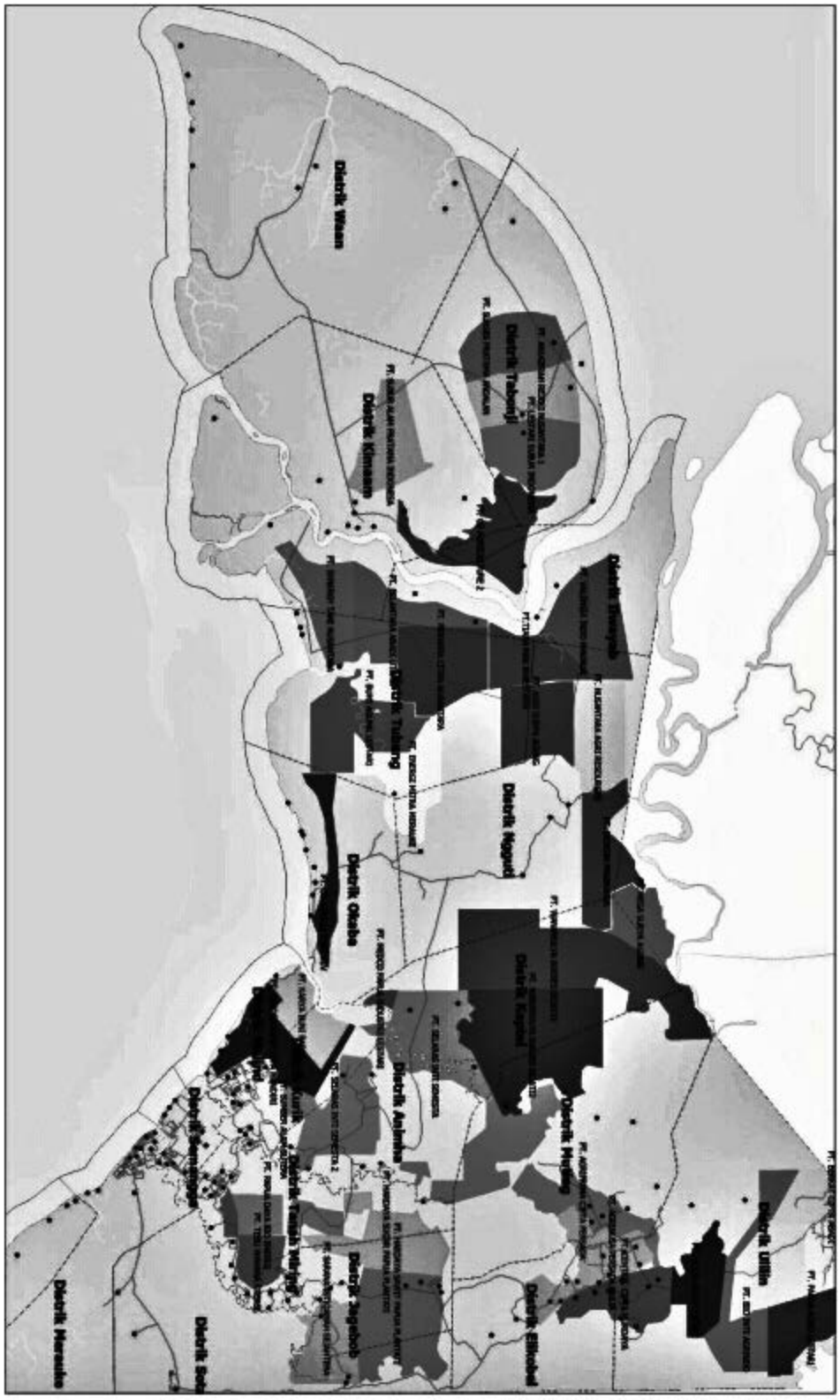

Gambar 3 Peta Izin Lokasi 2008–2010 (Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 2010)

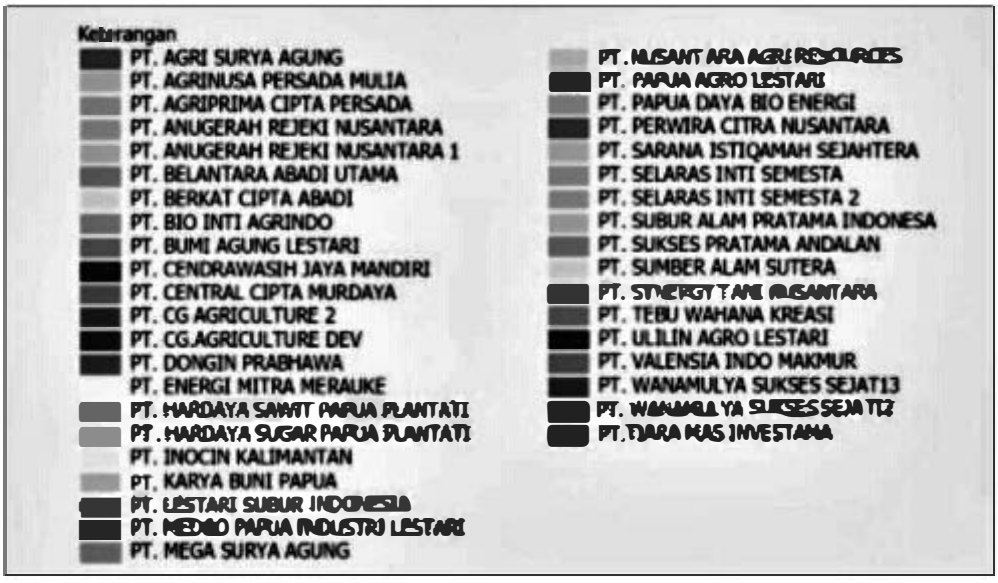

Gambar 3 Peta Izin Lokasi 2008–2010
(Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 2010)

seperti tawaran untuk membebaskan mereka dari ketertinggalan dan menjadikan mereka manusia-manusia maju. Sebagai balasan, warga kampung bersedia menyerahkan tanah mereka untuk dimanfaatkan atau diolah perusahaan menjadi kebun kayu akasia, kebun tebu, kebun sawit, sampai kebun singkong.

Untuk mengukuhkan nalar pertukaran itu, perusahaan secara sengaja mengubah diri menjadi orang yang datang dari luar dan ingin tinggal mencari makan di tanah warga. Selaiknya orang yang datang, tentu harus menunjukkan "niat baik". Selain berbagai janji, "niat baik" perusahaan diekspresikan dalam pemberian uang yang disebut sebagai uang tali asih, uang ketuk pintu, atau uang penghargaan atas tanah ulayat. Perusahaan menyodorkan makna pemberian uang sebagai uang pinangan. Perusahaan ibarat laki-laki yang sedang meminang Sang Mama. Mama atau ibu adalah personifikasi tanah sebagai perempuan atau ibu yang menghidupi

orang kampung. Jika pinangan diterima, uang yang diberikan dibalas dengan penyerahan tanah.

Penunggangan makna-makna budaya tersebut melancarkan perolehan tanah bagi beberapa perusahaan besar yang sudah beroperasi atau sedang memulai operasinya dalam naungan proyek MIFEE. Orang Merauke memberi istilah taktik tipu-menipu atau strategi manipulasi ini sebagai "cara-cara Abunawas". Jika semakin canggih caranya, dijuluki sebagai "Abuti" atau "Abunawas Tinggi". Dengan cara "Abuti" itulah Medco berhasil mengakuisisi 300.000 hektare tanah hanya dengan kompensasi uang 300 juta rupiah yang disebut sebagai uang ketuk pintu, pemberian genset, dan pembangunan gedung gereja. Grup Rajawali juga berhasil melakukan akuisisi tanah di kampung Domande seluas 40.000 hektare dengan besaran uang tali asih 3 miliar rupiah, belum termasuk pembangunan berbagai sarana kampung senilai total 4 miliar rupiah; ditambah akuisisi baru seluas 13.800 hektare di kampung Kaliki dengan uang kompensasi 3,5 miliar rupiah.

Penyerahan uang yang ditukar dengan tanah diselenggarakan dalam upacara-upacara adat bunuh babi yang menandai kesahihan transaksi. Darah babi yang menetes di atas tanah dimaknai sebagai meterai. Tanah yang sudah dimeterai hanya akan kembali kepada pemiliknya ketika habis masa perjanjian. Dalam perjanjian dengan Medco, tanah dipinjam pakai selama 60 tahun. Grup Rajawali diberikan tanah untukmasa pakai 35 tahun. Apakah uang pinangan bisa menggantikan kesempatan satu sampai dua generasi baru warga kampung untuk memanfaatkan tanah? Bisakah dibayangkan masa depan orang di kampung menjadi lebih damai dan sejahtera

Gambar 4 Upacara Bunuh Babi untuk Penyerahan Tanah di Kaliki (Foto: Laksmi A. Savitri)

Gambar 5 Sosialisasi Rencana Perkebunan Sawit di Distrik Ulilin (Foto: Kizito Heru)

sampai 60 tahun ke depan? Apa sesungguhnya dampak yang akan datang menghadang?

Kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai "sosialisasi" maupun Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) jauh dari memadai untuk memberikan jaminan atas keselamatan hidup rakyat. Dampak yang dibayangkan akan diredam dari tindakan yang disebut sebagai "sosialisasi" antara lain gejolak sosial, konflik, dan penolakan warga kampung terhadap rencana proyek. Sementara itu, Amdal adalah cara meredam dampak protes, tuntutan hukum akibat pelanggaran peraturan lingkungan. Sedari awal, keberpihakan dari kedua cara ini bukan secara jernih untuk melindungi kepentingan warga "terkena dampak", melainkan lebih ditujukan untuk memastikan investasi dapat berlangsung dan tidak menimbulkan dampak merugikan terhadap perusahaan. Dokumen kerangka acuan Amdal, misalnya, yang seharusnya bisa diakses publik dan diberikan masukan, keberatan, atau komentar, menjadi dokumen yang disimpan oleh perusahaan dan difungsikan sebagai alat bukti pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan izin usaha perkebunan. Kegiatan "sosialisasi" diperlakukan sebagai cara untuk menegosiasikan pelepasan tanah sekaligus memenuhi prosedur formal yang mengharuskan pemberitahuan akan dilaksanakannya rencana proyek.

Begini tutur seorang warga kampung. *Ada orang perusahaan datang bersama orang pemerintah menjumpai orang-orang di kampung atau mengundang orang kampung ke kantor distrik untuk melakukan sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah pertemuan antara orang perusahaan, orang pemerintah, dan*

orang-orang yang mewakili kampung untuk memberitahu orang kampung mengenai rencana perusahaan yang akan ditempatkan oleh pemerintah di atas tanah-tanah penduduk.

Sosialisasi atau pemberitahuan adalah penyampaian informasi yang sudah merupakan hasil keputusan, bukan untuk dipertanyakan, diperdebatkan, apalagi diubah. Tidak ada ruang negosiasi bagi orang kampung untuk tidak bersetuju atau meminta perubahan atas keputusan tersebut. Acara sosialisasi dibentuk menjadi arena yang mana janji-janji dan suntikan imajinasi atas masa depan diselipkan di antara hati dan benak orang kampung. Maka, pada kedatangan berikutnya, sosialisasi sudah menjadi arena negosiasi: apa yang bisa kamu berikan dan apa yang bisa aku dapatkan? Setelah pinang-meminang terlaksana, dan negosiasi mencapai sejumlah kesepakatan, yang terjadi berikutnya adalah hantaman gelombang yang kekuatan mematikannya jauh dari bayangan orang Marind.

Ketika perusahaan Rajawali datang meminta tanah orang Domande yang berisi rawa sumber air dan hutan perawan, yaitu tanah yang tidak termasuk dalam wilayah yang mereka berikan, pernyataan mereka adalah: *Kami juga mau kami punya hidup maju. Tapi kalau hutan ditebang habis, baru kasuari, buaya, ke mana?* Orang Marind berpikir ke depan dan memperti mbangkan keadilan antargenerasi. Kegelisahan utama mereka ketika berbagai tawaran uang untuk ditukar dengan tanah berdatangan adalah bagaimana mereka bisa menyediakan alam bagi kehidupan anak-cucu selanjutnya? Tepat di titik ini, janji perusahaan untuk menyekolahkan anak-anak mereka serta menjadikan para

Bagan 2 Proses Perampasan Tanah

pemuda sebagai pegawai perusahaan seolah memberi jawab atas kegelisahan itu. Ada harapan akan masa depan melalui jalan yang sesuai dengan tuntutan zaman: sekolah dan bekerja di kantor, bukan di alam. Tetapi, dengan seribu keprihatinan dalam batin, sampai hari ini tak ada yang nyata. Janji itu kosong!

Memberi mimpi, menyodorkan janji, memberikan tekanan-tekanan pada ketaatan terhadap supremasi hukum nasional, dan menjatuhkan stigma gerakan separatis adalah beberapa cara saja yang digunakan untuk menciptakan kondisi sehingga orang tidak memiliki pilihan lain kecuali menyerahkan tanah. Ada dua jalur yang harus ditempuh para pemodal yang menginginkan penguasaan atas tanah di Merauke. Pertama, jalur aturan dan perundang-undangan nasional. Kedua, jalur adat. Proses pengambilalihan tanah dari tangan orang Marind dapat dilihat pada Bagan 2.

Setelah Menyerahkan Tanah: Ke Mana Orang Marind?

Satu cerita dari tanah Zanegi dan Buepe menghadirkan banalnya ingkar janji perusahaan. Medco mulai beroperasi di tanah kampung orang Zanegi sejak 2008. Medco bisa mendapat restu setelah meminang tanah Zanegi dengan kompensasi 300 juta rupiah dan mendapat pengakuan tali persaudaraan melalui pengangkatan Arifin Panigoro sebagai anak adat: Namek Arifin Warko Gebze. Di balik mulusnya acara pinangan, terucap janji Bupati Gebze bahwa suatu saat Zanegi akan menjadi kota kecil. Bukan hanya alam yang diolah, melainkan manusia Zanegi juga akan "diolah": disekolahkan, diberi pelatihan, dari tidak tahu menjadi tahu.

Alam yang diolah itu, siapa yang menerima keuntungan? Silakan cermati angka-angka berikut ini.

1. Para tuan dusun menerima kompensasi kayu Rp2.000 per meter kubik, tapi kenyataannya diterima Rp1.400 per meter kubik karena dikurangi 30% dari 100% volume kayu akibat adanya celah pada tumpukan batang kayu dan kayu yang keropos.
2. Kontraktor pengawas menerima Rp7.000 per meter kubik.
3. Operator tebang menerima Rp20.000 per meter kubik.
4. Borongan upah kupas kayu Rp25.000 per meter kubik
5. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, ekspor kayu serpih yang diproduksi Medco pada 2010 mencapai 135 dolar Amerika Serikat per meter kubik atau Rp12.737.250 per meter kubik.
6. Volume kayu yang ditebang per hektare sekitar 180 meter kubik. Luasan areal yang sudah ditebang dari 2010 hingga 2011 diperkirakan lebih dari 3.000 hektare sehingga diperkirakan volume kayu yang dihasilkan adalah 540.000 meter kubik dalam satu tahun. Nilai kayu ini, jika diberi harga sesuai standar harga kayumenurutSurat Keputusan (SK) Gubernur PapuaNomor 184 Tahun 2004 tentang dana kompensasi bagi masyarakat atas kayu dari areal hak ulayat, yakni Rp10.000 per meter kubik untuk jenis nonkayu merbau, maka menghasilkan nilai Rp5.400.000.000 pertahun.
7. Apabila dibandingkan antara penerimaan orang Zanegi dari kompensasi kayu dan harga kayu jika dijual ke pengusaha kayu lokal, didapat perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1 Harga Pembayaran Kayu Per Meter Kubik oleh Medco

Operator Gergaji Mesin	Kontraktor Pengawas	Pemilik Dusun	Jenis dan Ukuran Kayu	Keadaan Hutan
Rp20.000	Rp7.000	Rp2.000	Semua jenis kayu dan ukuran.	Hutan dibabat habis.

Diolah dari hasil wawancara.

Tabel 2 Perbandingan Harga Kayu Pengusaha Lokal/Merauke

Operator Gergaji Mesin	Pemilik Dusun	Jenis dan Ukuran Kayu	Keadaan Hutan
Rp50.000 s/d Rp100.000	Rp50.000 s/d Rp100.000	Kayu pilihan untuk angunan dengan diameter lebih dari 50 sentimeter.	Hutan tebang pilih, tidak dibongkar semua.

Diolah dari hasil wawancara.

Manusia yang akan "diolah" dari tidak tahu menjadi tahu, bagaimana kenyataannya? Hingga 2011, 49 pemuda kampung bekerja di perusahaan sebagai Buruh Harian Lepas (BHL). Tetapi, kini sudah memasuki tahun keempat dan status mereka tetap BHL. Di antara mereka tidak ada yang dilatih menjadi operator alat berat, pekerjaan yang dinilai bergengsi, atau duduk di kantor berhadapan dengan komputer layaknya gambaran menjadi pegawai.

Anak kampung Zanegi bekerja di Departemen Planning. Tetapi, sesungguhnya mereka bertugas mengidentifikasi jenis-jenis kayu yang akan ditebang, mengidentifikasi pemilik blok tebang untuk memastikan penerima pembayaran kompensasi kayu, dan menjadi pemandu *surveyor* yang akan mendelineasi blok tebang berikutnya. Departemen Corporate Social Responsibility (CSR) juga mempekerjakan anak kampung sebagai penyambung lidah perusahaan, penyampai rencana dan tawaran perusahaan, pelapor kejadian-kejadian yang merugikan perusahaan, dan

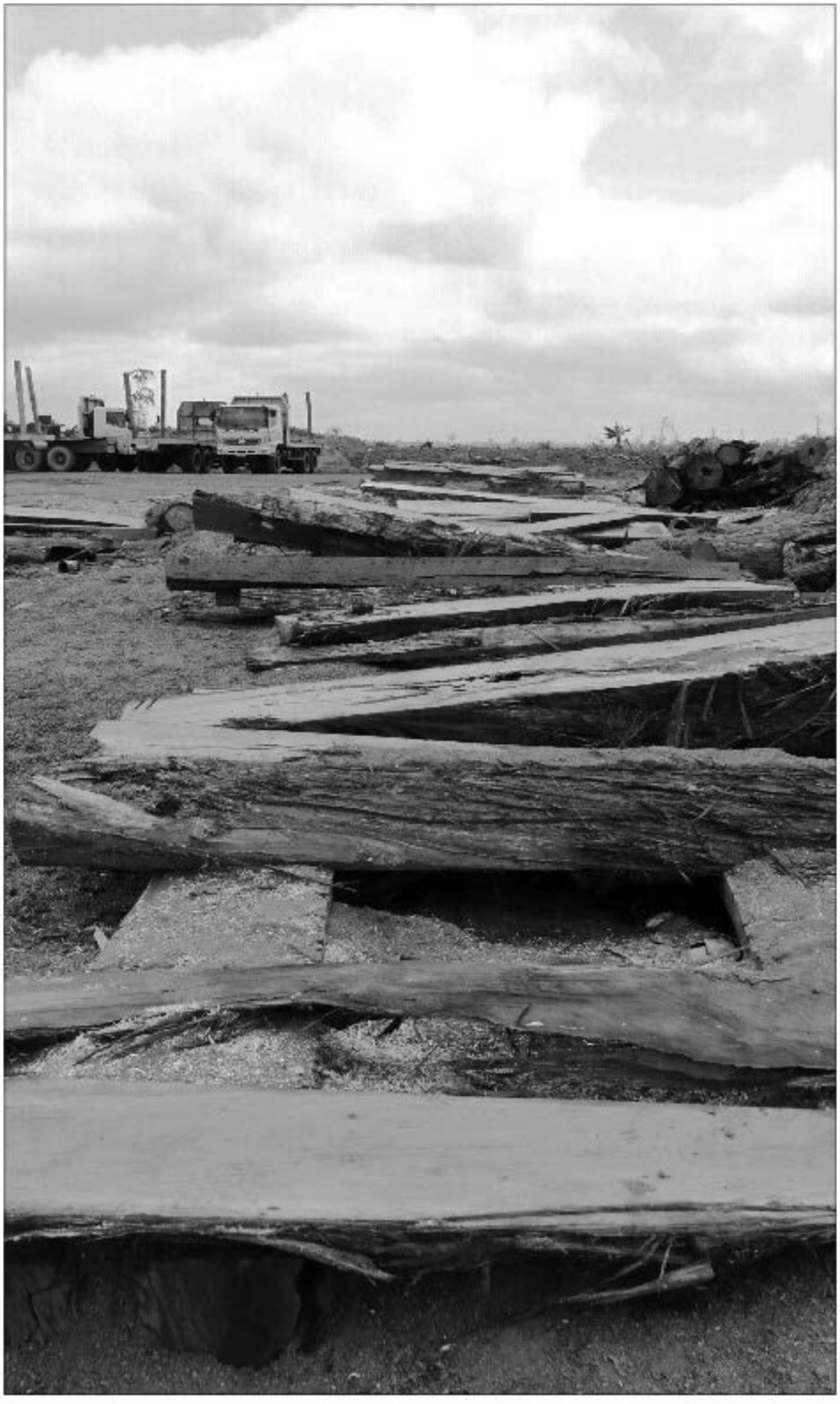

■ **Gambar 6** Hasil Penebangan Kayu di Zanegi (Foto: Zuhdi S. Sang)

penghubung antara masyarakat dan perusahaan. Ada anak lain yang bekerja di Departemen Planting, yang sehari-hari bertugas menanam dan menyiram bibit akasia. Paling buruk bekerja di bagian *cleaning service*. Di dua tempat terakhir itulah, tempat-tempat yang tidak punya masa depan, mereka paling banyak dipekerjakan.

Dengan upah Rp50.000 sehari, seorang bapa harus mencukupi kebutuhan makanan keluarga yang bergantung pada beras, ikan kaleng, dan mi di kios. Beras sehari 3 kilogram, berarti Rp30.000, ditambah mi dan ikan kaleng, juga pinang dan rokok yang tidak boleh tidak, maka habislah upah satu hari, bahkan sering tidak cukup. Mama tidak pergi memangkur sagu karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan seorang diri, harus saling bantu antara bapa dan mama. Maka, karena bapa pergi bekerja di perusahaan, terpaksalah beli beras. Bapa harus pergi kerja untuk dapat uang sehingga tidak bisa pergi berburu. Jadi, kecukupan protein untuk anak harus didapat dari ikan kaleng, yang tidak bisa dibeli setiap hari. Mari kita lihat tabel perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah masuknya perusahaan. Tabel berikut ini menunjukkan perbedaan produksi dan konsumsi yang mencolok antara sebelum dan sesudah warga kampung menjadi buruh di perusahaan

Tabel 3 Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Warga Zanegi

Per Keluarga	Sebelum	Sesudah
Produksi per bulan	400 kg daging @ Rp15.000/kg Total Rp 6.000.000	Upah Rp50.000 per hari, 20 HOK Total Rp1.000.000
Konsumsi per bulan	Daging tidak beli. Sagu tidak beli. Pisang tidak beli. Ubi, keladi tidak beli. Beras 20 kg= Rp200.000 Pinang = Rp 300.000 Rokok = Rp105.000 **Total Rp 605.000**	Beras 90 kg= Rp 90.000 Mi 90 bungkus = Rp 180.000 Ikan kaleng 15 kaleng = Rp 150.000 Pinang = Rp300.000 Rokok = Rp105.000 **Total Rp 825.000**

Diolah dari hasil wawancara.

Akhirnya, tidak mengherankan bila dalam beberapa tahun berselang sejak bapa menjadi buruh perusahaan, *tubuh mama menjadi kurus seperti pinsil karena hanya makan satu kali satu hari.* Ia mendahulukan bapa dan anak-anak. Untuk menahan lapar, mama banyak mengonsumsi pinang dan tembakau. Akibatnya, menurut pengakuan Ibu Bidan, *banyak ibu menyusui memiliki bayi yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).*[21] Bidan kampung pun terkejut karena dalam sejarah dua belas tahun mengabdi di Zanegi, baru kali ini ia menemukan 15 anak penderita gizi buruk dan kurang gizi. Penyakit tuberkulosis juga diderita orang-orang kampung karena mereka semakin banyak mengonsumsi tembakau dan rokok. *Lebih banyak uang di tangan, lebih banyak konsumsi sampingan,* begitu pengamatan Ibu Bidan, yang juga pemilik kios terbesar di Zanegi. Bahkan, berita terakhir dari kampung Zanegi mengabarkan meninggalnya 5 anak balita karena gizi buruk.

Gambar 7 Perempuan dan Anak-anak Zanegi (Foto: Kizito Heru)

Kerusakan tubuh juga mendera perempuan akibat datangnya penyakit menular seksual. Setelah adanya kamp-kamp penebangan yang berdiri tidak jauh dari kampung, mulai berjalanlah suplai kenikmatan seksual melalui perempuan pekerja seks yang diimpor dari luar kampung. Bahkan, setelah diizinkannya penjualan minuman keras di kampung, kios minuman keras ini pun diam-diam menjadi kios penjaja seks. Untuk kedua kalinya Ibu Bidan terkejut karena ada tiga mama yang terindikasi *Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS). Ibu Bidan melihat semua gejala di tubuh tiga perempuan Zanegi ini mengarah ke penyakit berbahaya itu sehingga ia merujuk mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perilaku seksual laki-laki Zanegi yang tidak bersetia pada satu perempuan menyebabkan penyakit ini menimpa istri-istri mereka.

Di Buepe juga terjadi kelaraan yang hampir serupa. Sebanyak 58 orang kampung bekerja di perusahaan. Tetapi, pada 2012, hampir semua pekerja perusahaan telah dipecat. Dengan alasan akan ditingkatkan status dari BHL menjadi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), mereka diminta untuk melakukan pemeriksaan medis dan menyerahkan ijazah. Pemeriksaan medis harus dilakukan di Merauke di klinik yang ditunjuk oleh perusahaan, kemudian diberikan jangka waktu tertentu untuk melaporkan bahwa mereka sudah menempuhnya. Setelah itu, akan ditagih ijazah. Dua hal ini sulit untuk dilakukan oleh semua orang karena ongkos ke Merauke butuh biaya sedikitnya 200 ribu rupiah ditambah biaya hidup di kota yang tidak murah. Meskipun tes medis gratis, tapi biaya yang harus ditanggung untuk menunaikannya tidak bisa

dipenuhi oleh semua orang. Pun setelah hal itu dilakukan, problem berikutnya adalah mengadakan ijazah yang jarang dimiliki oleh pemuda kampung. Kalaupun mereka bersekolah sampai SMA, belum tentu mereka memegang ijazah karena menebus ijazah pun butuh biaya. Maka, jadilah janji peningkatan status itu sebagai jalan untuk pemecatan.

Buepe seperti dusun mati di malam hari karena gelap dan tidak ada laki-laki di kampung. Semua masuk hutan, pergi berburu; berburu ke hutan yang sudah terletak semakin jauh dari kampung karena 2.800 hektare sudah dibabat Medco dan berganti menjadi pabrik kayu serpih dan kebun akasia. Pusat kegiatan perusahaan yang terletak hanya tiga kilometer dari kampung selalu terang-benderang di malam hari, menyajikan kontras yang miris dengan kampung Buepe yang gelap dan sepi. Hanya sapi-sapi putih yang berkeliaran bebas di malam hari, memenuhi jalan kampung dengan kotorannya.

Hantaman gelombang investasi sudah menerpa dan menggugurkan tubuh Anim-Ha untuk ke sekian kali. Kali ini gelombang itu lebih tak tertahankan karena datang dalam bentuk pukauan uang. Uang yang melepaskan ikatan-ikatan orang Marind dengan tanahnya, membawa kerusakan hutan, rawa, dan sungai yang menjadi sumber materiil, kelengkapan budaya Marind, dan identitas kemanusiaan Marind. Orang Marind diberi nama sesuai nama tempat dimana moyang mereka menetapkan kepemilikan tanah klan. *Orang melekat pada tanahnya*, demikian sistem kehidupan Marind mengatur masa depan. Tetapi, sekarang tanah sudah hilang.

Gambar 8 Penyerahan Uang Kompensasi oleh Medco (Foto: Kizito Heru)

Gambar 9 Uang Kompensasi dari Medco (Foto: Kizito Heru)

Uang penukar tanah pun telah merusak tubuh Anim-Ha, lagi-lagi dengan berbagai macam penyakit yang dulu tak ada di kampung. Lalu merusak kekerabatan dan rasa kebersamaan karena pertikaian tentang siapa yang lebih berhak atas tanah; siapa yang harus mendapatkan apa dan berapa. Mekanisme adat untuk memberikan sanksi melalui *suanggi* juga telah digunakan untuk menghantam mereka yang tak mau menyerahkan tanah atau mereka yang ingin menguasai tanah keluarga. Pertikaian sering berujung pada pembunuhan melalui *suanggi*. Kematian dan pertikaian tidak asing dalam kehidupan Marind, tapi sekali ini pembunuhan memberikan peluang bagi meluasnya pencaplokan tanah-tanah orang Marind. *Suanggi* melancarkan penyerahan tanah di Domande. Dengan *suanggi* pula perlawanan orang yang tak mau menyerahkan tanah di Zanegi dinyatakan. Tetapi, pembunuhan itu telah memberi peluang bagi perusahaan untuk menawarkan uang yang bisa membebaskan orang kampung dari tuduhan pembunuhan, asal ditukar dengan tanah. Satu pembunuhan bisa memiliki efek yang tak terhingga pada kematian kemanusiaan kaum Marind. Rantai akibat kehilangan tanah menjadi panjang dan mencekam.

Pertanyaan tentang masa depan layak ditempatkan ulang dalam perencanaan MIFEE. Masa depan ditentukan oleh tindakan masa lalu dan sekarang. Maka, kita tidak berhak merampas waktu dan ruang masa depan yang bukan milik manusia hari ini. Para perencana dan pengambil keputusan mungkin masih memiliki waktu berpikir dan bertindak sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, lalu meninggalkan warisan. Setelah itu, manusia baru

menjalani hidup berdasarkan warisan yang ditinggalkan. Jika pertanyaan masa depan diletakkan dalam peta investasi MIFEE pada 2010, data yang terbaca adalah sekitar 2 juta hektare tanah diizinkan oleh pemerintah kabupaten untuk digunakan oleh 46 perusahaan, bisa sampai 60 atau 90 tahun ke depan.

Dua juta hektare tanah berarti hampir setengah dari luas Kabupaten Merauke. Perubahan drastis dari berbagai bentuk ekosistem menjadi perkebunan kayu, tebu, dan sawit monokultur mengandung kemungkinan rusaknya 2 juta hektare hutan, ribuan hektare rawa, ribuan kilometer persegi badan sungai, belum lagi terhitung ekosistem unik seperti savana dan gambut. Di atas 2 juta hektare tanah itu sudah tumbuh ribuan dusun sagu, hidup ribuan satwa, ratusan hektare kebun karet rakyat, dan ribuan hektare kebun kelapa yang ditanam sejak lebih dari lima puluh tahun lalu. Pada jutaan hektare tanah itu bergantung dunia kehidupan warga kampung dan kota di seluruh pelosok Merauke.

Diukurkah seberapa besar kemungkinan kerusakan sosial ekologis yang sudah dan akan terjadi sekaligus dampaknya terhadap warga sekitar? Pernahkah diperhitungkan apa dan berapa keuntungan yang akan diterima warga kampung dari perubahan drastis bentang alam mereka? ❑

Bagian Keempat

6. Mempertahankan Tanah, Merebut Masa Depan Marind Anim

Di tengah blok-blok tandus habis tebang di Zanegi, terdapat sepetak kebun berisi bermacam tanaman. Kebun ini dimiliki oleh Polikarpus Balagaize. Ia menanam mulai dari sagu sampai rica (cabai). Ada juga tebu dan nanas. Pisang, ubi, dan singkong bertebaran di mana-mana. Terong, labu, dan macam rupa sayuran, termasuk kangkung di anak kali yang mengalir melintasi tanahnya, bahkan ikan yang ia rencanakan untuk dibesarkan di anak kali yang dibendung sebagian.

Ini tanah hak saya, katanya. Ia teguh bahwa, dengan menanam, ia tegaskan hak kepemilikan atas tanahnya. Perusahaan yang berusaha menggusur Polikarpus dari tanahnya ditolak dan tidak berhasil menggeser sejengkal pun Polikarpus dari "etalase kios"-nya. Ia mengumpamakan kebun seperti kios. Orang sengaja datang

untuk membeli ubi dan sayuran di kios hidup Polikarpus yang terletak tepat di pinggir jalan utama kebun kayu perusahaan.

Di bagian lain, Bonaficius Gebze juga berhasil menciptakan firdaus di tengah hamparan tanah gundul yang membuat depresi. Ia menanam segala macam sayuran dan jenis tanaman yang bahkan dicari perusahaan agar bisa menyuplai ke dapur mereka. Di kampung Zanegi juga ada Melki Tomba, orang Wambon yang terjerat cinta wanita Zanegi' lalu mereka berkeluarga dan menetap di sana. Di tanah yang diolah Melki, bedengan beragam sayuran, ubi, keladi, rica, kacang panjang, dan timun berderet rapi, dipagari bambu, terlindung dari gangguan babi hutan. Setiap pekan ia memasok sayuran untuk perusahaan. Di muka rumahnya, ada pohon buah-buahan, salah satunya sirsak yang sedang berbuah lebat, menerbitkan selera.

Meninggalkan Zanegi, berperahu di rawa Inggun yang anggun berhias teratai ungu, lalu memasuki kampung Wayau, ada Nenek Rufina. Nenek bertubuh mungil ini dengan penuh semangat tetap berkebun sampai hari tua. Di kebun Nenek Rufina, macam-macam ubi dan sayuran telah mencukupi semua kebutuhan sehari-hari. Bahkan, kerabat sering minta dibantu olehnya untuk membiayai sekolah anak mereka. Nenek Rufina hidup mandiri sampai hari tua. Ia tidak pernah merasa susah atau menyusahkan orang lain untuk mencari uang pembeli minyak tanah atau obat nyamuk. Dengan berkebun, ia merasa selalu ada uang di tangan, bahkan bisa untuk menabung.

Melaju ke arah timur Merauke, melewati Wasur, sampai di Sota menikung ke utara menyusuri perbatasan yang dijaga puluhan pos

Gambar 10 Kebun Petani di Zanegi (Foto: Laksmi A. Savitri)

Gambar 11 Kebun Karet Rakyat di Selil (Foto: Laksmi A. Savitri)

militer, terus berjalan memasuki Muting, lalu disambung dengan *longboat* menyusuri Kali Bian ke arah hulu selama empat jam, kita akan memasuki kampung Selil. Selil adalah "kota buah". Tak ada sejengkal pun tanah pekarangan yang tak diisi pohon buah. Kalau musim rambutan datang, juga manggis dan durian, kampung Selil kewalahan menyalurkan hasil kebun. Buah-buah terlalu banyak untuk diangkut menggunakan *longboat* yang berbentuk sempit ramping, tapi juga terlalu lama di jalan jika dibawa dengan *belang* yang lamban. Akibatnya, orang Wambon di kampung Selil sering membiarkan buah-buahan jatuh membusuk di tanah.

Berjalan sedikit, menjauhi permukiman ke arah hutan, kita memasuki perkebunan karet milik keluarga-keluarga di Selil. Pohon karet sepelukan orang berdiri tegak seluas ratusan hektare. Inilah kekayaan lain orang Selil. Setiap pekan mereka bisa menghasilkan ratusan lembar karet dari empat mesin giling yang diletakkan di tengah kebun. Pergi pagi hari untuk menyadap, sore hari bisa didapat 20 liter getah. Getah ini lalu diolah dan digiling menjadi lembar karet yang siap dibeli Rp17.500 per kilogram. Orang Selil tidak pernah khawatir tak punya uang atau kehabisan bahan makanan. Memangkur sagu mereka lakukan berkelompok dan sudah dibantu alat parut untuk membuat sagu menjadi tepung.

Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah pancaran sinar lampu dari tengah hutan, enam kilometer dari kampung, yang kini berubah menjadi kamp perkebunan kelapa sawit. Kegiatan perusahaan yang sedang membangun jalan menyebabkan air Kali Bian yang dulu bening pun sekarang keruh. Seorang mama mengeluh, *air keruh bikin ikan jadi bingung dan membuat umpan*

tak kelihatan, sehingga memancing ikan untuk konsumsi sehari-hari sekarang makin sulit.

Di luar hal itu, mereka hampir tak punya masalah mengembangkan ruang hidup. Kalaupun perusahaan datang dan kepemilikan tanah mereka tak diakui lagi oleh orang Marind-Bian, mereka tak akan protes, katanya. Hal yang penting bagi mereka, perusahaan membuat sarana-prasarana kampung menjadi lebih baik.

Mengalihkan pandangan menjauhi kampung-kampung *deg* dan masuk di deretan kampung *duf*, sampailah di satu kampung yang paling membesarkan hati. Itulah Makaling. Di sini sebagian besar rumah berdinding pelepah sagu yang disusun sangat rapi, berlantai bambu, dan beratap rumbia, menjadikan rumah-rumah di pinggir pantai ini sejuk sekaligus tahan angin. Rumah-rumah berjajar rapi di kiri-kanan jalan kampung. Halaman rumah mereka adalah laut luas yang menyediakan sepuluh lapangan bola ketika surut, dan lapangan voli yang setiap sore selalu penuh dengan anak muda. Kampung ini dipadati kebun kelapa, baik yang sudah hampir setinggi Monumen Nasional di Jakarta maupun yang baru ditanam kemarin. Luas kampung ini 900 hektare, tepat dihitung oleh mantan kepala kampung yang uniknya bukan orang Marind, nyata dari marganya yang bernama Sitompul. Ia datang merantau dari Sumatra pada 1970-an dan terpikat kepada gadis Makaling sehingga menjadi satu dengan alam dan orang Makaling. Saat ini *Paitua*[22] Sitompul menjadi *mithawal* atau penasihat adat dari golongan Mayo Ndaman, golongan dalam masyarakat Marind yang terkenal keras aturan adatnya.

Gambar 12 Kampung Makaling (Foto: Zuhdi S. Sang)

Gambar 13 Ikrar Tidak Menjual Tanah di Makaling (Foto: Kizito Heru)

Makaling adalah satu-satunya kampung di pantai Distrik Okaba yang secara keras, tegas, dan tanpa basa-basi menolak masuknya perusahaan. Alasannya, begini tutur Ndiwaen, Ketua Adat Mayo di Makaling: *Tete saya, moyang saya, sampai bapa saya dan saya ini belum pernah titip pesanan bahwa "infekstur"* (investor) *atau perusahaan besar raksasa datang masuk untuk pelepasan tanah atau kontrak atau apa, tidak ada pesanan, saya sampaikan sama perusahaan, "Tidak!" Dan saya juga tidak! Alasannya karena moyang belum pernah bilang bahwa besok kalau perusahaan besar datang kau serahkan tanah supaya kau hidup mewah, begini-begini, tidak! Biar saya hidup sederhana.*

Banyak terobosan baru yang dibuat oleh Makaling atas inisiatif *Paitua* Sitompul, di antaranya pemberlakuan pembagian tanah untuk semua warga tanpa pandang bulu, baik bulu bermoyang Marind, *Daeng*, maupun *Mas* Jawa. Sitompul berhasil mengorganisasi pembagian tanah marga yang terletak di sepanjang pinggir jalan yang akan menghubungkan Okaba ke Wamal. Tanah tersebut dibagikan kepada semua penduduk agar orang Makaling menjadi penerima manfaat pertama dan langsung dari hadirnya pembangunan jalan yang membelah pinggir kampung. Di tanah itu, setiap keluarga dan penduduk yang belum berkeluarga mendapat pembagian tanah 1 hektare untuk kebun kelapa dan 2.500 meter persegi untuk kaveling rumah. Jadi, bukan cuma marga tuan dusun yang akan mendapat manfaat dari pembangunan jalan, melainkan semua warga kampung Makaling, baik asli maupun ipar-ipar yang kawin masuk.

Makaling kaya karena hasil laut, hasil kelapa dalam bentuk kopra dan minyak kelapa, bahkan hasil buruan di hutan dan

ikan rawa yang belum pernah habis. Lebih dari itu, Makaling kaya karena keyakinan mempertahankan kesejatiannya sebagai manusia. Anim-Ha yang melekat pada tanah, hutan, dan air. *Kami ini manusia alam, begitu kata mereka. Tanah ini dijanjikan untuk anak-anak yang lahir di tanah ini. Hutan kami menyediakan seluruh kebutuhan hidup dan adat budaya kami.* Keyakinan itu membulatkan tekad orang Makaling untuk mengundang seluruh kampung yang berada di sepanjang pantai Okaba sampai Tubang untuk mengambil sikap atas perusahaan yang datang ke wilayah mereka.

Siang hari, 19 April 2012, ketua adat, kepala kampung, dan kepala marga dari tiga belas kampung bersumpah janji di Tiang Ka'u atau Tiang Kesaksian bahwa mereka tidak menjual, menyewakan, maupun melepaskan tanah kepada investor. Tiga belas kampung telah menentukan masa depan dan meneguhkan ruang hidup bagi generasi Marind yang akan datang.

Gambaran semangat membangun hidup dengan mengolah dan mempertahankan tanah, baik sebagai upaya untuk bertahan hidup dan membangun kehidupan keluarga (seperti dicontohkan oleh *Paitua* Polikarpus sampai Nenek Rufina) maupun dalam rangka memastikan masa depan bersama sebagai sebuah komunitas (sebagaimana ditekadkan oleh warga Makaling dan ketiga belas kampung pantai lain), adalah bukti nyata bahwa sebagian orang Marind dan kaum lain yang tinggal di tanah Merauke memiliki prinsip tegas. Pertama, keputusan atas tanah adalah keputusan bersama. *Kami duduk bersama, biar sampai berapa hari, untuk putuskan bersama soal tanah.* Kedua, tanah tidak untuk dijual

(makandimatab oleb). Kami tidak menjual, menyewakan, atau melepaskan tanah kepada investor, biar kami hidup sederhana. Ketiga, *tanah kami hanya untuk diolah dan dimanfaatkan oleh anak, cucu, cece kami sampai akhir zaman.*

Dari berbagai ucapan yang terlontar dalam pertemuan-pertemuan di berbagai kampung, tercetus nada yang hampir sama tentang visi masa depan yang diinginkan, yakni perubahan yang menjadikan kaum Marind dan kaum lain sebagai tuan di tanah sendiri. *Kami ini orangnya, di tanah yang dijanjikan.* Kini, lebih dari setahun sejak ikrar tersebut diucapkan, berita di harian *Kompas* tertanggal 31 Agustus 2013 melaporkan bahwa warga dari tiga belas kampung di Distrik Okaba, Tubang, Ilwayap, dan Ngguti menolak kehadiran perusahaan apa pun di tanah ulayat mereka.

Jadi, ada alternatif lain untuk kemajuan, selain pembangunan pertanian industrial yang hanya menguntungkan investor besar. Berbagai teladan yang ditunjukkan oleh komunitas di Makaling dan Selil, atau contoh keberanian dan ketekunan seorang bapa dan mama di tengah berbagai kondisi sulit, seperti di Zanegi dan Wayau, seakan memberikan harapan bahwa masih ada jalan lain menuju terang. Alternatif inilah yang selaiknya terus digali, diuji coba, dan dikembangkan sebagai upaya untuk memastikan proses perubahan yang mendudukkan orang Marind dan Papua pada umumnya sebagai penentu dan pemilik masa depan mereka sendiri. Semua indah pada waktunya. ❑

"Namik, nahisa, nahai anim, es anim, nahin, makan dimatab oleb. Mabateme, wanangga es hanid nanggo."

"Saudara-saudara, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, jangan jual tanah untuk perusahaan. Kasihan, itu milik kalian dan anak cucu di masa mendatang."

JEREMIAS NDIKEN, KEPALA DISTRIK OKABA, 21 MARET 2011

Catatan Akhir

1 Melihat dari ketinggian untuk mendapat pandangan yang lebih luas.

2 MP3EI dihasilkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dikeluarkan sebagai produk hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011.

3 Istilah yang digunakan oleh ilmuwan pencetus konsep ini adalah rezim pangan (*food regime*) (Friedmann 1982, 1993). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh ilmuwan lain sebagai alat analitis yang melengkapi penjelasan hubungan antara produksi makanan, model pertanian, dan akumulasi kapital secara global (Friedmann dan McMichael 1989; McMichael 2005, 2009, 2010, 2012). Penjelasan mereka menegaskan bahwa makanan bukan sekadar barang dagangan (komoditas), melainkan juga menciptakan berbagai bentuk hubungan, mulai dari individu sampai negara dan antarnegara, dan membentuk, juga dibentuk oleh, berbagai peristiwa dan kejadian, baik yang bersifat politik maupun alami.

[4] Menurut keterangan kaum yang tinggal di sepanjang pantai dari Sanggase sampai Wamal, sebutan Marind dengan huruf *r* adalah dialek orang Buti ke arah timur, sedangkan mereka menyebutnya dengan Malind atau menggunakan huruf *l*. Begitu juga penyebutan dengan huruf *z*, seperti Gebze, yang merupakan dialek Buti, berubah menjadi huruf *h*, yaitu Gebhe, ketika dibahasakan oleh orang Sanggase sampai Wamal.

[5] Peninggalan dari bedengan ini masih bisa dilihat tidak jauh dari kota Merauke, yaitu di belakang Buti dan Yobar (Kaize 2002).

[6] Hasil penelitian Frumensius Obe Samkakai (2009).

[7] Nama-nama ini adalah nama aliran kepercayaan dalam suku Marind yang masing-masing diambil dari tokoh mitis yang dipuja mereka. Setiap aliran ini memiliki domain wilayah dan ritual sendiri, serta mengembangkan aturan-aturan dan tata cara dalam mengelola kehidupan berdasarkan mitologi yang mereka percaya.

[8] Agar tidak menerima penjelasan van Baal (1966) sebagai satu-satunya penjelasan tentang *dema* dan *totem* Marind Anim, informasi rincian dari pembagian *totem* setiap marga ini belumlah lengkap dan masih membutuhkan pencarian serta pendalaman lebih lanjut. Proses penggalian data tentang *totem-totem* ini cukup sulit karena terbentur semacam tabu, sistem kepercayaan adat yang tidak menghendaki hal ini dibicarakan secara sembarangan dan hanya orang-orang tertentu yang boleh atau berhak menyampaikannya karena semua ini berkaitan langsung dengan *dema*.

[9] Berdasarkan tinggalan monumen AMD, tuturan dari tokoh pemerintah kabupaten, dan pernyataan beberapa kepala kampung.

[10] Seorang pemilik kios penjual barang kelontong di Kurik IV yang

datang sebagai transmigran pada 1967 menceritakan bahwa semua anaknya sekarang tinggal di Jawa sebagai pegawai negeri atau pemilik perusahaan dan yang paling kecil masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jawa atas biayanya.

[11] Seorang antropolog yang melaksanakan penelitian tentang kaum Marind selama 2,5 tahun, kini menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Kabupaten Merauke.

[12] Wawancara dengan Frumensius Obe Samkakai pada 13 Maret 2012.

[13] Mengayau adalah perburuan kepala yang dilakukan di masa lalu oleh suku-suku tribal. Alasan ritual ini dilakukan memiliki dasar yang berbeda-beda antara satu suku dan suku lain. Orang Dayak Kenyah, misalnya, melakukan ritual mengayau sebagai upaya adaptasi pada pertumbuhan populasi dan keterbatasan alam sehingga harus memperluas teritori yang mereka kuasai (Vayda 1969). Sementara itu, orang Marind melakukan pengayauan demi mendapatkan nama bagi keturunannya. Bagi orang Marind, sesejati-sejatinya nama laki-laki adalah nama yang diambil dari orang yang mereka ambil kepalanya atau *koei-igis* (van der Kroef 1952) atau *igih*.

[14] Dalam catatan sejarah gereja Katolik di Papua, nama yang dimaksud adalah pastor Vertenten, yang bertugas di wilayah Merauke pada 1910–1915 (Majelis Waligereja Indonesia 1974).

[15] Keengganan untuk menyebut budaya mengayau ini kemungkinan merupakan residu dari trauma pemberantasan budaya ini oleh pemerintah Belanda. Keuskupan Agung Merauke (1999) mencatat, "Pada 1913, pemerintah Belanda secara tegas berusaha menghentikan praktik mengayau yang dilakukan masyarakat di pantai selatan. Tengkorak-tengkorak dikumpulkan dan dibakar serta para kepala perang

dipenjarakan dan dikirim ke Ambon. Namun setelah itu, muncul suatu penyakit menular yang ganas. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan intim. Bagi masyarakat, penyakit itu dibuat oleh dukun-dukun yang jahat serta anggapan bahwa hal itu merupakan kutukan dari *dema-dema* karena mulai meninggalkan adat mereka (mengayau)."

16 Sebutan orang Marind untuk burung cendrawasih.

17 Pada 1921–1940-an, sekolah yang dibangun oleh misi disebut sekolah pemberadaban yang mengajarkan cara-cara hidup yang dianggap lebih beradab sesuai dengan iman Kristen.

18 Saling mencelakai dengan menggunakan kekuatan gaib atau sering disebut sebagai "santet".

19 *Ohan* (bahasa Marind) artinya "berburu".

20 *Tete* (bahasa Marind) artinya "kakek/nenek".

21 Data jumlah penderita penyakit dan jenis penyakit tidak selalu dilaporkan secara akurat karena dianggap dapat memengaruhi penilaian kinerja petugas pelayanan kesehatan di kampung bersangkutan (wawancara dengan bidan Zanegi pada 28 Februari 2012)

22 *Paitua* adalah sebutan untuk laki-laki dewasa yang sudah menikah dan biasa digunakan di Indonesia bagian timur. Di Jawa, misalnya, disebut "bapak".

Sumber Bacaan

van Baal, J. 1966. *Dema: Description and Analysis of Marind-Anim Culture (South New Guinea).* The Hague: Martinus Nijhoff.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. 2010. *Daftar Investasi Kabupaten Merauke 2010*. Merauke: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Merauke.

Beck, F.W.J Mansvelt. 1957. "Koembe-Project." Annual Project Evaluation Report.

Boelaars, Jan. 1986. *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan.* Jakarta: Gramedia.

Corbey, Raymond. 2010. *Headhunter From the Swamp: Marind Anim of the New Guinea as seen by the Misionaries of the Sacred Heart 1905–1925*. Leiden: KITLV Press.

Dinas Sosial Kabupaten Merauke. 1972. *Marind 70 (Tujuh Puluh) Tahun dalam Proses Akulturasi: Studi tentang Latar Belakang Keadaan*

Masyarakat Mari'nd. Merauke: Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Provinsi Irian Barat.

Erari, Karel Phil. 1999. *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis-Eko Teologi dalam Perspektif Melanesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Friedmann, Harriet. 1982. "The Political Economy of Food: The Rise and Fall of the Postwar International Food Order." Supplement: Marxist Inquiries: Studies of Labor, Class, and States. *American Journal of Sociology* (88): S248–S286.

___. 1993. "The Political Economy of Food: A Global Crisis." *New Left Review* I (197): 29–57.

___ dan Philip McMichael. 1989. "Agriculture and the State System: The Rise and Decline of National Agricultures, 1870 to the Present." *Sociologia Ruralis* XXIX (2): 93–117.

Greenomics Indonesia. 2012. "Peatland and Forest at Serious Risk: From Merauke Food and Energy Estate Development." 15 Februari. Diunduh pada 18 Agustus 2012. http://www.greenomics.org/docs/Report_201202_Merauke_Food_and_Energy_Estate.pdf.

Hall, Stuart. 1993. "Cultural Identity and Diaspora." Dalam *Colonial Discourse and Postcolonial Theory: a Reader,* disunting oleh Patrick Williams dan Laura Chrisman, 392–401. London: Harvester Wheatsheaf.

___. 1996a. "The Problem of Ideology, Marxism without Guarantee." Dalam *Stuart Hall: Critical Dialogue in Cultural Studies,* disunting oleh David Morley dan Kuan-Hsing Chen, 24–25. London, New York: Routledge.

___. 1996b. "Who Needs Identity?" Dalam *Questions of Cultural Identity*, disunting oleh Stuart Hall dan Paul du Gay, 1–17. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication.

Ito, Takeshi, Noer Fauzi Rachman, dan Laksmi A. Savitri. 2011. "Naturalizing Land Dispossesion: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia." Makalah dalam konferensi internasional "Global Land Grabbing" yang diselenggarakan Land Deals Politics Initiative (LDPI) bekerjasama dengan *Journal of Peasant Studies*, University of Sussex, Brighton, 6–8 April.

Kaize, Gerardus Nd. 2002. "Okabaku Sayang, Okabaku Malang: Merauke 1892–2002." Tidak dipublikasikan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Pertanian. 2010. *Grand Design MIFEE*. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Keuskupan Agung Merauke. 1999. *Sejarah Gereja Katolik di Irian Selatan: Menghantarkan Suku-suku Irian kepada Kristus*. Merauke: Keuskupan Agung Merauke.

Knauft, Bruce M. 1993. *South Coast New Guinea Cultures: History, Comparison, Dialectic*. Cambridge, New York, Victoria: Press Syndicate of the University of Cambridge.

___. 2002. *From Primitive to Postcolonial in Melanesia and Anthropology*. Michigan: University of Michigan Press.

van der Kroef, J. 1952. "Some Head-Hunting Traditions of Southern New Guinea." *American Anthropologist* 54 (2): 221–235.

Majelis Waligereja Indonesia. 1974. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia: Sejarah Gereja Katolik di Wilayah Keuskupan Agung Merauke dan Keuskupan Agats.* Ende: Bagian Dokumentasi Penerangan, Kantor Waligereja Indonesia.

McMichael, Philip. 2005. "Global Development and the Corporate Food Regime." Dalam *New Directions in the Sociology of Global Development: Research in Rural Sociology and Development, Volume 11*, disunting oleh Frederick H. Buttel dan Philip McMichael, 265–299. Emerald Group Publishing Limited.

___. 2009. "A Food Regime Genealogy." *Journal of Peasant Studies* 36 (1): 139–169.

___. 2010. "Agrofuels in the Food Regime." *Journal of Peasant Studies* 37 (4): 609–629.

___. 2012. "The Land Grab and Corporate Food Regime Restructuring." *Journal of Peasant Studies* 39 (3–4): 681–701.

Media Indonesia. 2011. "Selain di Merauke, Pemerintah akan Bangun Food Estate Baru." 8 Januari. Diakses pada 24 Februari 2012. http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/01/08/193878/4/2/Selain_di_Merauke_Pemerintah_Akan_Bangun_Food_Estate_Baru.

Overweel, Jeroen A. 1992. *Suku Marind dalam Alam dan Lingkungannya yang Berubah: Sebuah Studi tentang Perubahan Sosial-Ekonomi dalam Masyarakat Suku Marind untuk Membantu Merumuskan Strategi Jangka Panjang dari Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Yapsel).* Merauke: Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hidup.

Samkakai, Frumensius Obe. 2009. "Malind Anim: Dahulu, Sekarang dan Masa Datang." Makalah pada Kongres Pemuda Marind Anim, Merauke, 17 Juli.

Tim Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel, Papua. 2004. *Laporan Penelitian Bisnis Militer di Boven Digoel, Papua*. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Tempo. 2003. "Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar, Gagal." 8 Oktober. Diakses pada 23 Agustus 2012. http://www.tempo.co/read/news/2003/10/08/05820664/Proyek-Lahan-Gambut-Sejuta-Hektar-Gagal.

The Jakarta Post. 2010. "Government Promises More Land for Agriculture." 5 Februari. Diakses pada 18 Agustus 2012. http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/05/government-promises-more-land-agriculture.html.

___. 2012. "Merauke Food Estate Land Likely to Shrink by 80%." 12 Juli. Diakses pada 13 Agustus 2012. http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/12/merauke-food-estate-land-likely-shrink-80.html.

Vayda, Andrew P. 1969. "The Study of the Causes of War, with Special Reference to Head-Hunting Raids in Borneo." *Ethnohistory* 16 (3): 211–224.

Verschueren, J. 1970. "Marind-Anim Land Tenure." *New Guinea Research Bulletin* 38: 42–58.

Widjojo, Muridan S. (penyunting). 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Yayasan TIFA.

Zakaria, R. Yando, Emilianus Ola Kleden, dan Y.L. Franky. 2010. *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind*. Jakarta: Yayasan Pusaka.

Singkatan

AMD	ABRI Masuk Desa; ABRI singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kini Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Amdal	Analisis mengenai Dampak Lingkungan
Bangdes	Pembangunan Desa
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBM	Bahan Bakar Minyak
BHL	Buruh Harian Lepas
Bimas	Bimbingan Massal; program Revolusi Hijau di Indonesia yang dimulai pada 1970 untuk mendorong intensifikasi padi, yang diturunkan dalam bentuk paket *input* dan kredit.*)
BKPMD	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BPN	Badan Pertanahan Nasional

BPS	Badan Pusat Statistik
CSR	*Corporate Social Responsibility*
FAO	*Food and Agriculture Organization*
HGU	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	*Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome*
HOK	Hari Orang Kerja
Inmas	Intensifikasi Massal; program Revolusi Hijau di Indonesia yang diluncurkan pada 1976 untuk mendorong intensifikasi bantuan dengan teknik menyediakan kredit subsidi kepada partisipan yang sebelumnya merupakan partisipan Bimas.*)
IDT	Inpres Desa Tertinggal; Inpres singkatan dari instruksi presiden.
Insus	Intensifikasi Khusus; program Revolusi Hijau di Indonesia yang diperkenalkan pada 1979–1980 untuk mendorong petani melakukan kegiatan tanam secara simultan sebagai cara mengendalikan gangguan hama.*)
ISPA	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IUP-B	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya
IUPHHK	Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
IUPK	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
IUP-P	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan
kg	Kilogram
LMA	Lembaga Masyarakat Adat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

MIFEE	*Merauke Integrated Food & Energy Estate*
MIRE	*Merauke Integrated Rice Estate*
MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
P3KH	Pengaduan Pertama Penyelesaian Kasus Hukum
Pepera	Penentuan Pendapat Rakyat
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKWT	Pekerja Kontrak Waktu Tertentu
PPK	Program Perbaikan Kampung
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu
Raskin	Bantuan dari pemerintah kepada warga miskin dalam wujud beras.
Rp	Rupiah
s/d	Sampai dengan
SK	Surat Keputusan

*) Penjelasan tambahan diambil dari buku Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (1996)—Penyunting.

Tentang Penulis

LAKSMI A. SAVITRI, pengajar di Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM). Bersama ketiga kawan, ia mendirikan dan mendedikasikan diri sebagai pengajar di Sekolah Agraria, yang terbuka bagi setiap peminat studi agraria dan pegiat agraria, dan didukung oleh Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Sejak 2005, penulis bergiat sebagai peneliti di Sajogyo Institute, sebuah lembaga studi agraria dan pedesaan yang didirikan oleh Prof. Sajogyo. Buku ini dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan penulis sebagai peneliti pascadoktoral di University of Amsterdam, Belanda, dengan dukungan Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)-WOTRO Science for Global Development.

Tim Peneliti dan Kontributor Data

ZUHDI S. SANG, alumnus program master Jurusan Ilmu Religi dan Budaya di Universitas Sanata Dharma, pegiat seni musik dan teater di Yogyakarta.

MUNTAZA, lulusan Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, pernah aktif sebagai pegiat di Institut Tititan Perdamaian, saat ini adalah peneliti di Sajogyo Institute.

YOSEPH RENYUT, *community organizer* dan fasilitator, berpengalaman selama lebih dari 20 tahun mengorganisasi warga di Papua bagian selatan, pernah aktif di World Vision sebagai fasilitator Area Development Program di Boven Digul-Tanah Merah, dan bergiat di Sekretariat untuk Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) selama lebih kurang tiga tahun terakhir.

YUSLAM FIKRI ANSHARI, *film maker*, aktif di Komunitas Perfilman Intertekstual (Kopi) dan selama lebih dari satu dekade adalah pegiat dalam pendidikan rakyat dan petani, serta advokasi untuk keadilan agraria.

HENGKY dan KIZITO HERU, pegiat di Sekretariat untuk Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) yang mengurus bidang media informasi dan publikasi.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

YOGYAKARTA ● INDONESIA

MIFEE